

LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
(LKIP)
TAHUN 2023



DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
KOTA BIMA

TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT. Kami sampaikan karena atas ijin-Nya jualah maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima Tahun 2023 selesai disusun. LKIP disusun sebagai langkah Pemerintah dari tatakelola kebijakan, program dan kegiatan pembangunan Daerah Kota Bima melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima adalah salah satu Organisasi Perangkat Daerah yang dibentuk oleh Pemerintah Kota Bima melalui Peraturan Walikota Bima Nomor 5 Tahun 2016 tentang Susunan, kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah Kota Bima, dengan melaksanakan Urusan Wajib yaitu Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pelayanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima Tahun 2023 disusun dalam rangka memenuhi Instruksi Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sesuai Visi dan Misi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima dalam kurun waktu tahun 2023.

Segala upaya dan pengerahan sumber daya telah dilakukan dalam mewujudkan visi dan melaksanakan misi-misi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan LKIP 2023 adalah wujud dari pertanggungjawaban kami tentang semua itu.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terwujudnya LKIP, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2023 ini, dan tidak lupa pula kami meminta maaf atas berbagai kelemahan dan kekurangan dalam penyusunan. Semoga laporan ini bermfaat dan dapat dipergunakan dengan sebaik-baiknya, terutama untuk mendukung pencapaian kinerja pada tahun-tahun yang akan datang dalam pembangunan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Raba-Bima, Februari 2024

Kepala



Syanrudin, SH

NIP. 19690707 198903 1 004

DAFTAR ISI

Halaman	
Judul	i
Kata Pengantar.....	ii
Daftar isi	iii
Daftar Tabel	iv
Daftar Gambar	vi
Ringkasan Eksekutif.....	vii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar belakang.....	1
1.2. Tugas, fungsi dan Strukur Organisasi.....	2
1.2.1. Tugas, fungsi	2
1.2.2. Struktus Organisasi	6
1.3. Sumber Daya, Sarana dan Prasarana	8
1.3.1. Sumber Daya.....	8
1.3.2. Sarana dan Prasarana.....	9
1.4. Isu Strategis dan Permasalahan Yang Dihadapi	10
1.5. Landasan Hukum	11
1.6. Sistimatika	12
BAB.II. PERENCANAAN KINERJA.....	13
2.1 Perencanaan Strategis	13
2.2 Penjelasan Indikator Kinerja Utama tahun 2023	16
2.3 Rencana Kinerja Tahunan	30
2.4 Penetapan kinerja Tahun 2023.....	37
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	43
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	43
3.1.1. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023.....	44
3.1.2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun 2022 serta Target Kinerja Renstra 2018-2023	57
3.2. Realisasi Anggaran.....	84
BAB.IV PENUTUP	89
4.1. Kesimpulan	89
4.2. Rekomendasi pemecahan masalah	90

DAFTAR TABEL

Nomor	Judul Tabel	Halaman
Tabel 1.1	Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima Tahun 2023.....	8
Tabel 1.2	Jumlah Pegawai Berdasarkan Eselon Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima Tahun 2023.....	8
Tabel 1.3	Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima Tahun 2023.....	9
Tabel 1.4	Sarana dan Prasarana Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima Tahun 2023	15
Tabel 2.1	Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kota Bima.....	14
Tabel 2.2	Penjelasan Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kota Bima	17
Tabel 2.3	Penjelasan Indikator Kinerja Sasaran Eselon II, III & IV Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kota Bima	19
Tabel 2.4	Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kota Bima Tahun 2023	30
Tabel 2.5	Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Indikator Kinerja Sasaran Eselon II, III & IV Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kota Bima Tahun 2023	31
Tabel 2.6	Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kota Bima Tahun 2023	36
Tabel 2.7	Perjanjian Kinerja Eselon II, III dan IV Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kota Bima Tahun 2023.....	38
Tabel 3.1	Interval Capaian Indikator Kinerja Sasaran.....	43
Tabel 3.2	Target dan Realisasi Perjanjian Kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2023.....	44
Tabel 3.3	Target dan Realisasi Perjanjian Kinerja Eselon II, III dan IV Tahun 2023	46
Tabel 3.4	Interval Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima Tahun 2023	51
Tabel 3.5	Interval Capaian Indikator Kinerja Eselon II, III dan IV Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima Tahun 2023	52
Tabel 3.6	Tingkat Capaian Kinerja Sasaran I Tahun 2023 Dibandingkan dengan Tahun 2022	58
Tabel 3.7	Tingkat Capaian Kinerja Sasaran I Tahun 2023 Dibandingkan dengan Capaian Kinerja Renstra 2018-2023	59
Tabel 3.8	Perbandingan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Eselon II, III dan IV Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima Tahun 2023 dengan Tahun 2022	62
Tabel 3.9	Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Anggaran Untuk Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran I Tahun 2023	64

Tabel 3.10	Tingkat Capaian Kinerja Sasaran II Tahun 2023 Dibandingkan dengan Tahun 2022	66
Tabel 3.11	Tingkat Capaian Kinerja Sasaran II Tahun 2023 Dibandingkan dengan Capain Kinerja Renstra 2018-2023	66
Tabel 3.12	Perbandingan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Eselon II, III dan IV Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima Tahun 2023 dengan Tahun 2022 ...	71
Tabel 3.13	Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Anggaran Untuk Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran II Tahun 2023	74
Tabel 3.14	Tingkat Capaian Kinerja Sasaran III Tahun 2023 Dibandingkan dengan Tahun 2022	76
Tabel 3.15	Tingkat Capaian Kinerja Sasaran II Tahun 2023 Dibandingkan dengan Capain Kinerja Renstra 2018-2023	75
Tabel 3.16	Perbandingan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Eselon III dan IV Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima Tahun 2023 dengan Tahun 2022.....	81
Tabel 3.17	Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Anggaran Untuk Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran III Tahun 20223	83
Tabel 3.18	Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima Tahun 2023	84
Tabel 3.19	Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Rutin dan Wajib Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima Tahun 2023	84

DAFTAR GAMBAR

<u>Nomor</u>	<u>Judul Gambar</u>	<u>Halaman</u>
	Gambar 1: Indeks Pemberdayaan Gender Tahun 2019 – 2023.....	58
	Gambar 2: Realisasi Indikator Kinerja Sasar II Tahun 2018 s/d 2022.....	65
	Gambar 3: Pelayanan Kasus KDRT dan Kasus Kekerasan Terhadap Anak Tahun 2023	67
	Gambar 4: Realisasi Indikator Kinerja Sasar III Tahun 2019 s/d 2023.....	75

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dinas Pemberdayaan Perempuan Kota Bima melaksanakan Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima berdasarkan Perda Kota Bima No. 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah. Adapun uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima dijelaskan lebih lanjut dalam Peraturan Walikota Bima No. 82 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya selama Tahun 2023, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima didukung oleh 25 pegawai baik yang berada di lingkup Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima maupun di Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan Perempuan dan anak.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan dari pembangunan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak selama 2023 dialokasikan anggaran yang bersumber dari Dana Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik (DAK NF). Oleh karena itu, penetapan kinerja yang telah diputuskan diawal tahun diharapkan dapat dicapai oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kota Bima telah merumuskan tujuan dan sasaran untuk membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, guna mewujudkan Visi Kota Bima "***Mewujudkan Kota Bima yang BERKUALITAS dan SETARA menuju Masyarakat yang Maju dan Mandiri***" dan untuk mewujudkan Visi Kota Bima tersebut maka dijabarkan kedalam 5 (lima) misi pembangunan jangka menengah Kota Bima sebagai berikut:

1. Mewujudkan Masyarakat **Berkualitas** yang Berdaya Saing;
2. Mewujudkan Masyarakat **Sejahtera** melalui pemerataan pembangunan dan Peningkatan Ekonomi Masyarakat yang Berbasis Pengembangan Produk Unggulan;
3. Menghadirkan Penyelenggaraan Pemerintahan dengan mengedepankan Prinsip Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik;
4. Mewujudkan Lingkungan yang Berkualitas dan **Ramah**, melalui Penyediaan Infrastruktur Pendukung Perkotaan yang terintegrasi dengan Pengurangan Resiko Bencana;
5. Mewujudkan Masyarakat yang Berkarakter dan **Agamais**

Visi dan misi yang sudah dirumuskan perlu dilengkapi dengan tujuan, sasaran serta indikator kinerja untuk memudahkan langkah pelaksanaannya maupun pengukuran hasil atau tingkat capaian dari visi dan misi tersebut.

Sasaran yang telah ditetapkan dalam Dokumen Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima menunjukkan arah yang ingin dicapai oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima dalam Periode 2018-2023. Sasaran yang ingin dicapai pada Tahun 2023 ditetapkan dengan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2023 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima. Dalam Penetapan kinerja tersebut menguraikan sasaran-sasaran dalam Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima. Pengukuran kinerja dilakukan terhadap 3 sasaran strategis dengan menggunakan 4 indikator yang ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2023. Dari 4 indikator sasaran yang diukur, 3 indikator mencapai target dan 1 indikator belum mencapai target.

Adapun indikator sasaran yang mencapai target antara lain 1) Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) sebesar 69,86% (target 67,81%), 2) Angka KDRT sebesar 0,050% (target 0,55), 3) Persentase Kecamatan yang memenuhi kriteria layak anak sebesar 100% (target 100%). Sedangkan indikator sasaran yang tidak mencapai target adalah Angka Kekerasan Terhadap Anak sebesar 0,076% (target 0,057%).

Jika dilihat kesesuaian dan relevansi antara rencana program dan kegiatan yang dilaksanakan selama tahun 2023 dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, terlihat sangat logis dan relevan. Hanya saja pencapaian sasaran dan penentuan angka sasaran yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan kualitas dan kuantitasnya.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : *Pendahuluan*, berisi penjelasan hal umum tentang Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima baik Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi serta aspek strategis antara lain sumber daya baik tenaga dan sarana dan prasarana serta peluang dan tantangan.

BAB II : *Perencanaan Kinerja*, menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima Tahun 2023.

BAB III : *Akuntabilitas Kinerja*, menguraikan capaian kinerja organisasi dan realisasi anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima selama tahun 2023.

BAB IV : *Penutup*, menguraikan penjelasan umum keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja sasaran tahun 2023 dan rencana antisipasi yang akan dilakukan di masa mendatang untuk mengatasi permasalahan.

Keberhasilan pembangunan dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak tidak semata-mata ditentukan oleh hasil kerja keras Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, melainkan sangat dipengaruhi oleh hasil kerja keras dan kontribusi positif

berbagai sektor pembangunan lainnya dan diperlukan pemahaman bersama dan kontribusi positif berbagai sektor pembangunan sehingga dalam pelaksanaan kegiatannya tidak semata-mata menjadi tanggung jawab Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai bagian dari pemerintah Kota Bima, melainkan harus dilaksanakan dan didukung oleh seluruh komponen masyarakat.

Akhirnya semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima yang telah disusun ini dapat memberikan manfaat, antara lain :

1. Menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima.
2. Menjadikan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima sebagai instansi pemerintah yang akuntabel, sehingga dapat berjalan secara efektif, efisien dan responsive terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya.
3. Mendorong Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai instansi Pemerintah Kota Bima untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara baik dan benar (*good governance*) yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
4. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima.

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.1. Latar Belakang

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kota Bima Tahun 2023 sebagai salah satu perangkat daerah di Kota Bima melaksanakan urusan wajib perencanaan pembangunan daerah. Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kota Bima juga mengedepankan prinsip-prinsip tatakelola pemerintahan yang baik. Salah satu wujud penerapan tatakelola pemerintahan yang baik tersebut adalah adanya kewajiban Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kota Bima untuk menyusun laporan kinerja. Laporan Kinerja tersebut disusun sesuai dengan ketentuan dan amanat Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja.

Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menyatakan bahwa pimpinan masing-masing SKPD bertanggung jawab atas pelaksanaan dan pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja dan anggaran yang telah dialokasikan untuk masing-masing SKPD. Kemudian setiap SKPD menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. Lebih lanjut, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja, menyatakan bahwa Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan Laporan Kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kota Bima Tahun 2023 ini, mengacu kepada Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kota Bima 2019–2023 yang merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bima Tahun 2018-2023, Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kota Bima Tahun 2023 yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Bima Tahun 2023, serta Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bima Tahun 2023 yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah Kota Bima.

Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak ini diharapkan dapat memberikan informasi secara jelas kepada Walikota dan pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) mengenai capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kota selama tahun 2023.

1.2. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

1.2. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

1.2.1. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Walikota Bima Nomor 82 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kota Bima mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kota Bima Tahun 2023 menyelenggarakan fungsi. Fungsi ini dijabarkan lebih lanjut pada unit organisasi sebagai berikut :

A. Kepala Dinas PP dan PA Kota Bima.

Mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi pelaksana Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Kepala Dinas mempunyai fungsi:

1. Penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat daerah;
2. Penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak yang wilayah kerjanya lintas daerah;
3. Pelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, nonpemerintah, dan dunia usaha;
4. Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah provinsi dan lintas daerah;
5. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak yang wilayah kerjanya lintas daerah;
6. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak dan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah;
7. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugas;
8. Pelaksanaan administrasi Dinas; dan
9. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

B. Sekretaris Dinas PP dan PA mempunyai tugas memberikan pelayanan administrasi yang meliputi perencanaan, keuangan, urusan tata usaha, perlengkapan rumah

tangga dan urusan ASN kepada semua unsur di lingkungan Dinas.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Kepala Dinas mempunyai fungsi:

1. Pengoordinasian penyusunan rencana dan program, penyusunan laporan dan evaluasi;
2. Pengelolaan urusan keuangan;
3. Pengelolaan barang inventaris milik/kekayaan daerah dan negara di lingkungan dinas;
4. Pengelolaan urusan ASN; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya. di bantu oleh:

a. Kasubag Umum

Subbagian Umum mempunyai tugas sebagai berikut:

- Melaksanakan kegiatan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian;
- Melaksanakan kegiatan urusan pemerintahan di bidang barang milik daerah;
- Melaksanakan kegiatan urusan pemerintahan di bidang ketatausahaan;
- Melaksanakan kegiatan urusan pemerintahan di bidang rumah tangga, keamanan dan kebersihan;
- Melaksanakan kegiatan urusan pengelolaan keuangan lingkup Dinas; dan
- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris.

b. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pemerintahan berdasarkan keahlian dan kebutuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, seta bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris.

C. Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan

Mempunyai tugas melaksanakan menyiapkan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan dibidang Kualitas Hidup Perempuan:

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Bidang Kualitas Hidup Perempuan mempunyai fungsi:

1. Penyiapan perumusan kebijakan bidang pelebagaan pengarusutamaan gender, bidang pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi, bidang peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan dan lembaga penyedia layanan kualitas keluarga;
2. pelaksanaan kebijakan bidang pelebagaan pengarusutamaan gender, bidang pemberdayaan perempuan di bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi, bidang peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan

3. kesetaraan gender dan bidang penguatan dan pengembangan lembaga lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan dan lembaga penyedia layanan kualitas keluarga;
4. Pelaksanaan koordinasi pelaksanaan pelembagaan pengarusutamaan gender;
5. Pelaksanaan koordinasi dalam pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data gender;
6. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data gender;
7. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelaksanaan pengarusutamaan gender, bidang pemberdayaan perempuan di bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi, bidang peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender, bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan dan lembaga penyedia layanan kualitas keluarga dan dalam pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data gender; dan
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya. di bantu oleh :

- a. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pemerintahan berdasarkan keahlian dan kebutuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, seta bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan.

D. Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak mempunyai tugas :

Mempunyai tugas melaksanakan menyiapkan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan dibidang Pemenuhan Hak Anak.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Bidang Pemenuhan Hak Anak mempunyai fungsi:

1. Penyiapan perumusan kebijakan bidang pelembagaan pemenuhan hak anak, bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak dan lembaga penyedia layanan kualitas keluarga, bidang peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan pemenuhan hak anak dan bidang penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan pemenuhan hak anak;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pelembagaan pemenuhan hak anak, bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak dan lembaga penyedia layanan kualitas keluarga dan bidang peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan pemenuhan hak anak;
3. Pelaksanaan pelayanan bagi keluarga dalam mewujudkan pemenuhan hak anak;

4. Pelaksanaan koordinasi dalam pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data anak;
5. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data anak;
6. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelembagaan pemenuhan hak anak, bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak dan lembaga penyedia layanan kualitas keluarga, bidang peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan pemenuhan hak anak, bidang penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan pemenuhan hak anak dan dalam pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data anak; dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya. di bantu oleh :

- a. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pemerintahan berdasarkan keahlian dan kebutuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, seta bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak.

E. Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak, mempunyai tugas:

Melaksanakan menyiapkan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan dibidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Bidang Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak mempunyai fungsi:

1. Penyiapan perumusan kebijakan bidang pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang memerlukan perlindungan khusus, bidang penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan dan penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus dan bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan dan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang memerlukan perlindungan khusus dan di bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan dan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus;
3. Pelaksanaan koordinasi pelaksanaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan dan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus;

4. Pelaksanaan koordinasi dalam pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data perempuan korban kekerasan dan data anak yang memerlukan perlindungan khusus;
5. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data perempuan korban kekerasan dan data anak yang memerlukan perlindungan khusus;
6. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang memerlukan perlindungan khusus, di bidang penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan dan penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus, di bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan dan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus dan dalam pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data perempuan korban kekerasan dan data anak yang memerlukan perlindungan khusus; dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya. di bantu oleh:

- a. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pemerintahan berdasarkan keahlian dan kebutuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, seta bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan.

F. Unit Pelaksana Teknis mempunyai tugas:

Membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

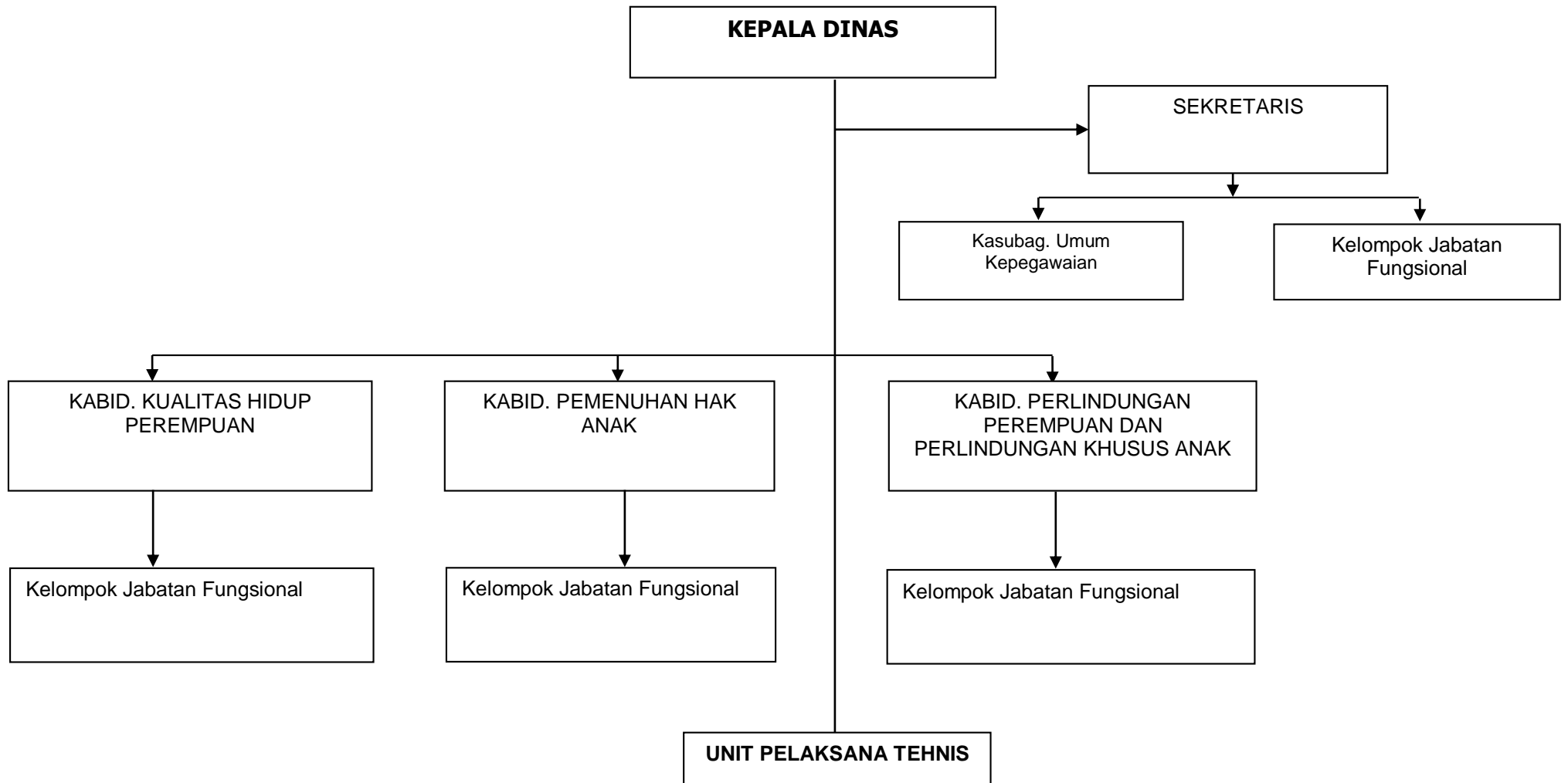
1.2.2. Struktur Organisasi

Susunan organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kota Bima terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut.

1. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kota Bima;
2. Sekretariat, yang terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum; dan
 - b. Kelompok Jabatana Fungsional.
3. Bidang Kualitas Hidup Perempuan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
4. Bidang Pemenuhan Hak Anak terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
5. Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kota Bima adalah sebagaimana di bawah ini.

Bagan Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kota Bima



1.3. Sumber Daya, Sarana dan Prasarana

1.3. Sumber Daya, Sarana dan Prasarana

1.3.1. Sumber Daya

Dalam melaksanakan kegiatan untuk pencapaian indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima harus di dukung oleh sumber daya yang berkualitas baik dari segi sarana dan prasarana pendukung. dari sisi sumber daya manusia, masih belum memadai baik itu secara kuantitas maupun secara kualitas, tetapi dengan memanfaatkan pola tanggungjawab dan jalur koordinasi yang semakin baik, maka dapat mendukung pencapaian kinerja dengan baik pula.

Sumber daya manusia (SDM) merupakan faktor penentu dalam mencapai keberhasilan organisasi. Berikut informasi terkait dengan SDM Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima per 31 Desember 2023.

a. Jumlah pegawai berdasarkan pendidikan

Gambaran jumlah pegawai berdasarkan pendidikan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1: Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima
Tahun 2023

No.	Pegawai	Jumlah
1.	S2	2
2.	S1	16
3.	Diploma 3	3
4.	SMA / sederajat	3
5.	SMP	1
	Jumlah	25

Uraian analisis kondisi pegawai perangkat daerah berdasarkan tingkat pendidikan belum terpenuhi.

b. Jumlah pegawai berdasarkan eselonering

Gambaran jumlah pegawai berdasarkan eselonering Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.2: Jumlah Pegawai Berdasarkan Eselon
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima
Tahun 2023

No.	Pegawai	Jumlah
1.	Eselon II	1
2.	Eselon III	4
3.	Eselon IV	1
4.	Eselonering	19
	Total	25

c. Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

Gambaran jumlah pegawai berdasarkan golongan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.3: Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima
Tahun 2023

No	Golongan	L	P	Jumlah
1	Golongan I	1	0	1
2	Golongan II	1	2	3
3	Golongan III	2	12	14
4	Golongan IV	5	2	7
	Jumlah	9	16	25

1.3.2. Sarana dan Prasarana

Untuk menunjang pelaksanaan tugas pelayanan kepada masyarakat, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima didukung oleh sarana dan prasarana sebagai berikut:

Tabel 1.4
Sarana dan Prasarana
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima
Tahun 2023

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Kondisi		Jumlah
		Baik	Rusak	
1	AC	6		6
2	Dispenser	3		3
3	Filling Besi/Metal	5		5
4	Hardisk External	1	1	2
5	Komputer PC	9		9
6	Kursi Kerja	38		38
7	Kursi Rapat Plastik	49		49
8	Kursi Tamu	1		1
9	Laptop	11	5	16
10	Lemari Arsip	5		5
11	Lemari Besi/Metal	1		1
12	Lemari Es (Kulkas)	1		1
13	Lemari Kayu	3		3
14	Meja 1/2 Biro	14		14
15	Meja Biro	15		15
16	Meja Kerja	26		26
17	Mesin Ketik Manual Portable		1	1
18	Printer	8	4	12
19	Rak Kayu	2	1	3

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Kondisi		Jumlah
		Baik	Rusak	
20	LCD Proyektor	2	1	3
21	Sound System		1	1
22	Tape Recorder		1	1
23	Televisi	4		4
24	UPS	3		3
	Jumlah	205	14	219

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima kebutuhan ruangan kerja masih belum memadai sesuai tuntutan dan kompleksitas permasalahan Uraian analisis kondisi sarana dan prasarana Dinas Pemberdayaan perempuan Dan yang dihadapi sehingga dapat mempengaruhi kelancaran pelaksanaan tugas. Selain itu, ruang pertemuan yang memadai dan representative untuk mendukung kelancaran operasional tugas Dinas Pemberdayaan perempuan Dan Perlindungan Anak (DPP dan PA) Kota Bima pun belum tersedia.

Fasilitas perkantoran yang dimiliki oleh Dinas Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak (DPP dan PA) Kota Bima sebagai penunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi adalah sebagai berikut:

- a. Mebelair, antara lain berupa meja, kursi, rak buku, dan lemari;
- b. Fasilitas Komunikasi, berupa jaringan telepon, jaringan internet, dan mesin faksimili;
- c. Perangkat komputer (laptop) untuk mendukung kegiatan administrasi maupun kegiatan teknis, dilengkapi dengan ketersediaan printer, dan server Internet;
- d. Peralatan pendukung pekerjaan, seperti kamera digital, mesintik, dan LCD proyektor;
- e. Perlengkapan elektronik lain yang mendukung kenyamanan dalam melaksanakan pekerjaan, seperti Kulkas, *air conditioner* (AC), kipas angin, dan televisi;
- f. Kendaraan dinas berupa mobil dan sepeda motor.

1.4. Isu-Isu Strategis dan Permasalahan yang Dihadapi

1.4. Geografi

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kota Bima sebagai SKPD yang mempunyai fungsi merumuskan kebijakan teknis perencanaan, mengkoordinasikan penyusunan perencanaan pembangunan Pemberdayaan

Perempuan dan perlindungan Anak dihadapkan beberapa isu strategis yang antara lain adalah sebagai berikut :

1. Masih terbatasnya data dan informasi yang dibutuhkan untuk perencanaan;
Data dan informasi merupakan salah satu elemen vital guna mendukung kegiatan PP dan PA. Kekurangan dan keterbatasan data dan informasi tersebut diharapkan menjadi pertimbangan dan bahan masukan penting demi penyediaan dan penyempurnaan data-data pendukung yang diperlukan dalam perencanaan Dinas PP dan PA.
2. Belum optimalnya partisipasi dan kerjasama *stakeholders* dengan Dinas PP dan PA. Kota Bima.
3. Dinas PP dan PA. Kota Bima. harus terus meningkatkan partisipasi dan kerjasama dengan berbagai *stakeholder* yang ada di Kota Bima seperti masyarakat, DPRD, Perguruan Tinggi, dan lain sebagainya. Peningkatan partisipasi dan kerjasama ini diharapkan bisa meningkatkan kualitas dan efektifitas perencanaan di Dinas PP dan PA. Kota Bima.
4. Belum optimalnya pelayanan prima dalam Dinas PP dan PA sebagai lembaga teknis daerah yang berfungsi sebagai pelayanan publik dalam bidang PP dan PA, maka sudah tentu Dinas PP dan PA Kota Bima harus berorientasi pada pelayanan prima dan ini dilakukan terlebih dahulu dengan berpedoman pada standar pelayanan minimal dalam melayani publik. Pelayanan prima ini diharapkan bisa menimbulkan kepuasan (*satisfaction*) bagi pihak-pihak yang terkait dengan Dinas PP dan PA. Kota Bima, terutama masyarakat Kota Bima.
5. Belum optimalnya kapasitas aparatur Dinas PP dan PA Kota Bima.
Keberadaan aparatur PP dan PA merupakan unsur penting dalam setiap pengambilan keputusan perencanaan, oleh karenanya peningkatan kapasitas aparatur merupakan sebuah komitmen untuk meningkatkan kualitas dalam bidang PP dan PA.

1.5. Landasan Hukum

1.5. Landasan Hukum

LKIP Kota Bima ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bima Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2021 Nomor 234, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 106) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bima Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2021 Nomor 234, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 106).

1.6. Sistematika

1.6. Sistematika

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Bima Tahun 2023 adalah :

- | | |
|---------|--|
| BAB I | PENDAHULUAN |
| | Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika. |
| BAB II | PERENCANAAN KINERJA |
| | Meliputi Perencanaan Strategis sebelum dan setelah reviu. |
| BAB III | AKUNTABILITAS KINERJA |
| | Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan. |
| BAB IV | PENUTUP |

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1. Perencanaan Strategis

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kota Bima sebagai Dinas teknis dituntut untuk selalu tanggap dan responsive terhadap dinamika serta perubahan-perubahan yang terjadi baik secara internal wilayah maupun secara eksternal. Disamping itu, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kota Bima juga dituntut untuk mampu menerapkan berbagai pendekatan perencanaan dalam konteks dan waktu yang tepat untuk mengakomodir aspirasi masyarakat dan kebutuhan berbagai kelompok atau pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kota Bima sebagai perangkat daerah di Kota Bima. Berkaitan dengan hal tersebut telah merumuskan tujuan serta sasaran yang ingin dicapai sebagai bagian dari perwujudan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut. Berkaitan dengan hal tersebut, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kota Bima telah merumuskan tujuan dan sasaran untuk membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, guna mewujudkan Visi Kota Bima “**Mewujudkan Kota Bima yang BERKUALITAS dan SETARA menuju masyarakat yang Maju dan Mandiri**” dan untuk mewujudkan Visi Kota Bima tersebut maka dijabarkan kedalam 5 (lima) misi pembangunan jangka menengah Kota Bima sebagai berikut:

1. Mewujudkan Masyarakat **Berkualitas** yang Berdaya Saing;
2. Mewujudkan Masyarakat **Sejahtera** melalui pemerataan pembangunan dan Peningkatan Ekonomi Masyarakat yang Berbasis Pengembangan Produk Unggulan;
3. Menghadirkan Penyelenggaraan Pemerintahan dengan mengedepankan Prinsip Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik;
4. Mewujudkan Lingkungan yang Berkualitas dan **Ramah**, melalui Penyediaan Infrastruktur Pendukung Perkotaan yang terintegrasi dengan Pengurangan Resiko Bencana;
5. Mewujudkan Masyarakat yang Berkarakter dan **Agamais**

Visi dan misi yang sudah dirumuskan perlu dilengkapi dengan tujuan, sasaran serta indikator kinerja untuk memudahkan langkah pelaksanaannya maupun pengukuran hasil atau tingkat capaian dari visi dan misi tersebut.

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Pemerintahan Kota Bima, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki Tujuan dan sasaran jangka menengah yang akan diuraikan sebagai berikut:

1. Pemberdayaan Perempuan dalam Pembangunan

Sasaran yang dicapai dari tujuan pertama meliputi sebagai berikut:

- a. Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan
- b. Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak

2. Mewujudkan Kota layak anak.

Sasaran yang dicapai dari tujuan kedua meliputi sebagai berikut:

- a. Meningkatnya Pemenuhan hak anak

Adapun pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kota Bima beserta indikator kinerja setiap tahunnya disajikan sebagaimana berikut ini:

Tabel 2.1.

Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kota Bima

TUJUAN OPD	INDIKATOR TUJUAN	TARGET	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	TARGET				
					2019	2020	2021	2022	2023
Pemberdayaan Perempuan dalam Pembangunan	Nilai APE(Anugrah Parahita Ekapraya)	Madya	Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	61,73%	63,25%	64,77%	66,29%	67,81%
			Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan Anak	Angka KDRT	0,63%	0,60%	0,58%	0,56%	0,55%
				Angka Kekerasan terhadap anak	0,095%	0,086%	0,067%	0,057%	0,057%
Mewujudkan Kota layak anak	Penghargaan Kota Layak Anak	Pratama	Meningkatnya Pemenuhan hak anak	Persentase Kecamatan yang memenuhi kriteria layak anak	20%	40%	60%	80%	100%

Guna mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Kota Bima, maka harus di dukung dengan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan. Adapun program, kegiatan dan sub kegiatan yang sesuai dengan Permendagri No. 90 Tahun 2019 dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 1. Penyusunan rencana kerja tahunan, Renja/Renstra
 2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
 4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
 6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD
 - c. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 1. Pengadaan Mebel
 2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 1. Penyediaan jasa surat menyurat
 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
2. Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan
 - a. Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota
 1. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG
 2. Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG
 - b. Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
 1. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan Dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi
 - c. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
 1. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
 2. Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kota/Kabupaten
 3. Program Perlindungan Perempuan
 - a. Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
 1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan
 2. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota

- b. Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota
 - 1. Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
- 4. Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak
 - a. Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/kota
 - 1. Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota
 - 2. Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota
- 5. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
 - a. Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
 - 1. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
 - 2. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
 - b. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
 - 1. Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
 - 2. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- 6. Program Perlindungan Khusus Anak
 - a. Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
 - 1. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
 - b. Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - 1. Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - c. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - 1. Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - 2. Koordinasi dan Sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus

2.2. Penjelasan Indikator Kinerja Utama Tahun 2023

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kota Bima telah menetapkan Indikator Kinerja utama (IKU) tahun 2023 sebagai ukuran keberhasilan dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Penetapan IKU ini telah mempedomani indikator kinerja daerah pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD) Kota Bima Tahun 2018-2023 serta dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kota Bima Tahun 2018-2023. Indikator Kinerja Utama ditetapkan dengan memilih indikator-indikator kinerja yang berfokus pada tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kota Bima.

Penjelasan tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kota Bima Tahun 2023 sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.2.
Penjelasan Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kota Bima

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN
Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	%	<p>IDG: $1/3 (I_{par} + I_{DM} + I_{Lind-Dist})$</p> <p>$I_{par}$ = Indeks keterwakilan di parlemen I_{DM} = Indeks pengambilan keputusan $I_{Lind-dis}$ = Indeks distribusi pendapatan</p> <p><i>Kriteria:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Indeks keterwakilan di parlemen adalah persentase perempuan yang berada di parlemen • Indeks pengambilan keputusan adalah persentase perempuan yang menduduki pejabat tinggi, manajer, pekerja profesional dan teknisi • Indeks distribusi pendapatan adalah persentase sumbangan pendapatan oleh perempuan <p><i>Penjelasan:</i></p> <p>IGD adalah merupakan indikator komposit untuk melihat peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. IDG difokuskan pada partisipasi untuk mengukur ketimpangan gender pada bidang-bidang kunci dalam partisipasi ekonomi dan politik.</p>

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN
Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan Anak	Angka KDRT	%	<p>Jumlah Kasus KDRT yang dilaoprkan.....x 100 % =%</p> <p>Jumlah Rumah Tangga Yang Ada...</p> <p><i>Kriteria:</i></p> <p><i>Kasus KDRT adalah semua kejadian kasus kekerasan yang ada di dalam rumah tangga (sesuai dgn Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga)</i></p>
	Angka Kekerasan terhadap anak	%	<p>Jumlah korban kekerasan anak yang ada ..x100%=...%</p> <p>Jumlah anak <18 thn...Org</p> <p><i>Kriteria:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Anak yang dimaksud adalah penduduk usia 0-17 thn (termasuk anak dalam kandungan) • Kekerasan terhadap anak adalah jenis-jenis kekerasan sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Perlindungan Anak
Meningkatnya Pemenuhan hak anak	Persentase Kecamatan yang memenuhi kriteria layak anak	%	<p>Jumlah Kecamatan Layak Anak x 100 % =%</p> <p>Jumlah Kecamatan yang Ada</p> <p><i>Kriteria Kecamatan Layak Anak:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya Gugus Tugas Kecamatan Layak Anak 2. Adanya Forum Anak Tingkat Kecamatan 3. Adanya Keterlibatan Forum Anak Dalam Perencanaan Pembangunan 4. Minimal 25% Kelurahan Layak Anak Di Wilayah Kecamatan Tersebut 5. Minimal 25% Kelurahan Melaksanakan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)

Tabel 2.3.
Penjelasan Indikator Kinerja Sasaran Eselon II, III & IV Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kota Bima

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	FORMULA INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	FORMULA INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	FORMULA INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Meningkatnya partisipasi perempuan dalam Pembangunan	Persentase partisipasi perempuan dalam berorganisasi	(Jumlah perempuan yang ikut aktif dalam berorganisasi / Jumlah perempuan \geq 18 thn yang ada) x100%=...% Kriteria: Organisasi yang dimaksud adalah semua organisasi yang melibatkan perempuan baik keanggotaan maupun kegiatannya dalam pembelaan hak-hak perempuan dan anak	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	% SKPD yang melaksanakan PPRG	(Jumlah SKPD yang melaksanakan PPRG / Jumlah SKPD yang ada) x 100%	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/ Kota	Kumulatif Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG)
			Meningkatnya kapasitas pemberdayaan perempuan	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan dan swasta	(Jml perempuan pd lembaga pemerintah & swasta... / Jumlah pekerja perempuan yang ada..... Org) x100%=...% Kriteria: - Lembaga pemerintah adalah legislatif dan eksekutif - Lembaga swasta adalah semua lembaga diluar dari unsur pemerintah				Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/ Kota	Kumulatif Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Responsif Gender (PPRG)

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	FORMULA INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	FORMULA INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	FORMULA INDIKATOR SUB KEGIATAN
						Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah keanggotaan perempuan dalam organisasi kemasyarakatan	Kumulatif Jumlah keanggotaan perempuan dalam organisasi kemasyarakatan	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan Dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kumulatif Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi
				Persentase peningkatan bidang usaha ekonomi perempuan	(Jumlah kelompok usaha perempuan penerima bantuan / Jumlah kelompok usaha perempuan yang ada) x 100%=...% Kriteria: - Perempuan yang dimaksud adalah pdd berjenis kelamin perempuan > 18 thn - Kekerasan perempuan adalah kekerasan yang terjadi pada perempuan sesuai dengan Undang-Undang No. 23 thn 2004 ttg Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga Penyedia Layanan Perempuan yang dibina	(Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Perempuan yang dibina / Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Perempuan yang ada) x 100%	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	Kumulatif Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	FORMULA INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	FORMULA INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	FORMULA INDIKATOR SUB KEGIATAN
									Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Kumulatif Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan yang Mendapat Peningkatan Kapasitas
									Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota yang Tersedia	Kumulatif Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	FORMULA INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	FORMULA INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	FORMULA INDIKATOR SUB KEGIATAN
	Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan	Program Perlindungan Perempuan	Meningkanya Pencegahan dan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan dan TPPO	Persentase pengaduan tindak kekerasan terhadap perempuan yang dilayani	(Jumlah kekerasan Perempuan terlapor yang tertangani / Jumlah Pengaduan yang ada) x 100%=...% Kriteria: - Perempuan yang dimaksud adalah pdd berjenis kelamin perempuan > 18 thn - Kekerasan perempuan adalah kekerasan yang terjadi pada perempuan sesuai dengan Undang-Undang No. 23 thn 2004 ttg Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Porsentase kasus rujukan lanjutan pagi perempuan korban kekerasan yang dilayani	(Jumlah kasus rujukan lanjutan yang dilayani / jumlah kasus rujukan lanjutan yang ada) x 100%	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Kumulatif Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan
									Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Kumulatif Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	FORMULA INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	FORMULA INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	FORMULA INDIKATOR SUB KEGIATAN
									Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	Kumulatif Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan
									Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kabupaten/Kota	Kumulatif Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	FORMULA INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	FORMULA INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	FORMULA INDIKATOR SUB KEGIATAN
		Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Meningkatnya pemenuhan data gender dan anak	Persentase pemenuhan data gender dan anak	(Jumlah data gender dan anak yang terpenuhi / jenis data gender dan anak yang harus ada) x 100%=...% Kriteria: - Data Kekerasan terhadap Anak - Data Kekerasan terhadap Perempuan - Data Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/kota	Jumlah data kekerasan gender dan anak yang dihasilkan	Kumulatif Jumlah data kekerasan gender dan anak yang dihasilkan	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/ Kota yang Tersedia	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak yang Tersedia
									Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/ Kota	Kumulatif Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	FORMULA INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	FORMULA INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	FORMULA INDIKATOR SUB KEGIATAN
	Meningkatnya perlindungan terhadap Anak	Program Perlindungan Khusus Anak	Meningkannya Pencegahan dan Penanganann tindak kekerasan terhadap Anak dan TPPO	Persentase pengaduan tindak kekerasan terhadap Anak yang dilayani	(Jumlah pengaduan korban kekerasan Anak yang tertangani / Jumlah pengaduan yang ada) x 100%=...% Kriteria: - Anak yang dimaksud adalah penduduk usia 0-17 thn (rermasuk anak dalam kandungan) - Kekerasan terhadap anak adalah jenis-jenis kekerasan sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah korban kekerasan anak yang dirujuk	Kumulatif jumlah korban kekereasan anak yang dirujuk	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendamping an Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota	Kumulatif Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendamping an Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak
									Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota	Kumulatif Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	FORMULA INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	FORMULA INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	FORMULA INDIKATOR SUB KEGIATAN
									Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kumulatif Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan
									Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Kumulatif Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	FORMULA INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	FORMULA INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	FORMULA INDIKATOR SUB KEGIATAN
						Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyedia layanan perlindungan khusus yang terbentuk	Kumulatif Jumlah lembaga penyedia layanan perlindungan khusus yang terbentuk	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/ Kota	Kumulatif Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus
									Koordinasi dan Sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/ Kota	Kumulatif Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	FORMULA INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	FORMULA INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	FORMULA INDIKATOR SUB KEGIATAN
	Meningkatnya Pemenuhan hak anak	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Meningkatnya pemenuhan hak anak	% meningkatnya lembaga yang memenuhi kriteria layak anak	(Jumlah lembaga yang yang memenuhi kriteria layak anak / lembaga yang ada) x 100%	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga yang menyediakan fasilitas ramah anak	Kumulatif Jumlah lembaga yang menyediakan fasilitas ramah anak	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	Kumulatif Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak
									Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kumulatif Jumlah dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	FORMULA INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	FORMULA INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	FORMULA INDIKATOR SUB KEGIATAN
						Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah PKM & Sekolah yang menyediakan fasilitas ramah anak	Kumulatif Jumlah PKM & Sekolah yang menyediakan fasilitas ramah anak	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kumulatif Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak
									Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kumulatif Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak

2.3. Rencana Kinerja Tahunan

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kota Bima Tahun 2023 dijabarkan berdasarkan Indikator Kinerja utama (IKU) dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kota Bima Tahun 2018-2023 dan dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kota Bima tahun 2023.

Tabel 2.4.
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Indikator Kinerja Utama (IKU)
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
perlindungan Anak Kota Bima Tahun 2023

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	SATUAN
Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	67.81%
Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan Anak	Angka KDRT	0.55%
	Angka Kekerasan terhadap anak	0.057%
Meningkatnya Pemenuhan hak anak	Persentase Kecamatan yang memenuhi kriteria layak anak	100%

Tabel 2.5.
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Indikator Kinerja Sasaran Eselon II, III & IV
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
perlindungan Anak Kota Bima Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	KEGIATAN	Indikator	Target	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET
1	Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase partisipasi perempuan dalam berorganisasi	32,00%	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	% SKPD yang melaksanakan PPRG	64,52%	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	12 dokumen
			Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan dan swasta	47,02%				Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	32 Perangkat daerah
					Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah keanggotaan perempuan dalam organisasi kemasyarakatan	80 org	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan Dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Organisasi

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	KEGIATAN	Indikator	Target	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET
			Persentase peningkatan bidang usaha ekonomi perempuan	57,40%	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga Penyedia Layanan Perempuan yang dibina	50%	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	25 lembaga
								Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	25 org
								Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	5 Dokumen
2	Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan	Program Perlindungan Perempuan	Persentase pengaduan tindak kekerasan terhadap perempuan yang dilayani	100%	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Penurunan jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan	56 kasus	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	2 dokumen

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	KEGIATAN	Indikator	Target	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET
								Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Perangkat daerah
					Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Porsentase kasus rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang dilayani	100%	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	17 Org
								Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	17 Layanan
		Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Persentase pemenuhan data gender dan anak	100%	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/kota	Jumlah data kekerasan gender dan anak	3 jenis data	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	10 Dokumen

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	KEGIATAN	Indikator	Target	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET
								Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Dokumen
3	Meningkatnya perlindungan terhadap Anak	Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase pengaduan tindak kekerasan terhadap Anak yang dilayani	100%	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Penurunan jumlah kasus kekerasan terhadap anak	46 kasus	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Perangkat Daerah
								Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen
			Persentase pengaduan tindak kekerasan terhadap Anak yang dilayani	100%	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah korban kekerasan anak yang dirujuk	40 kasus	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	41 Orang

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	KEGIATAN	Indikator	Target	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET
								Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	41 Layanan
					Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyedia layanan perlindungan khusus yang terbentuk	10 Lembaga	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen
								Koordinasi dan Sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Dokumen

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	KEGIATAN	Indikator	Target	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET
	Meningkatnya Pemenuhan hak anak	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	% meningkatnya lembaga yang memenuhi kriteria layak anak	54,762	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga yang menyediakan fasilitas ramah anak	23 lembaga	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	11 Organisasi
								Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	7 Dokumen
					Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah PKM & Sekolah yang menyediakan fasilitas ramah anak	8 PKM & 35 Sekolah	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	60 Orang
								Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen

2.4. Penetapan Kinerja Tahun 2023

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja, Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dalam hal ini, penerima amanah adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima Tahun 2023, sedangkan pemberi amanah adalah Walikota Bima.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun 2023, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja ini, antara lain sebagai berikut:

- a. Sebagai wujud nyata komitmen antara Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima dan Walikota Bima untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
- b. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
- c. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; dan
- d. Sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.

Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kota Bima Tahun 2023 terdiri dari 3 (tiga) sasaran strategis dan 4 (empat) indikator kinerja utama. Anggaran yang mendukung dalam Pencapaian indikator kinerja ini dilakukan melalui 6 (enam) program, 18 kegiatan dan 47 sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 9.883.351.886 Berikut tabel perjanjian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima Tahun 2023.

Tabel 2.6.
Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kota Bima Tahun 2023

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2023
Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	67.81%

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2023
Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan Anak	Angka KDRT	0.55%
	Angka Kekerasan terhadap anak	0.057%
Meningkatnya Pemenuhan hak anak	Persentase Kecamatan yang memenuhi kriteria layak anak	100%

Program :	Anggaran	Ket.
1 Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Rp. 4.740.279.000	
2 Program Perlindungan Perempuan	Rp. 336.044.600	
3 Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Rp. 47.427.000	
4 Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Rp. 215.856.200	
5 Program Perlindungan Khusus Anak	Rp. 943.619.100	
6 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 4.740.279.000	

Adapun perjanjian kinerja Eselon II, III dan IV yang mendukung pencapaian Indikator Sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.7.
Perjanjian Kinerja Eselon II, III dan IV Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kota Bima Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM /KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET 2023
1	Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase partisipasi perempuan dalam berorganisasi	32,00%
			Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan dan swasta	47,02%
			Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan dan swasta	57,40%
		Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	% SKPD yang melaksanakan PPRG	64,52%
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	12 dokumen

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM /KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET 2023
		Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	32 Perangkat daerah
		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah keanggotaan perempuan dalam organisasi kemasyarakatan	80 org
		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan Dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Organisasi
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Pesentase Lembaga Penyedia Layanan Perempuan yang dibina	50%
		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	25 lembaga
		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	25 org
		Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	5 Dokumen
2	Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan Anak	Program Perlindungan Perempuan	Persentase pengaduan tindak kekerasan terhadap perempuan yang ditangani	100%
		Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Penurunan jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan	56 kasus
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	2 dokumen

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM /KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET 2023
		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Perangkat daerah
		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Porsentase kasus rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang dilayani	100%
		Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	17 Org
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	17 Layanan
		Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Persentase pemenuhan data gender dan anak	100%
		Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/kota	Jumlah data kekerasan yang dihasilkan	3 jenis data
		Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	10 Dokumen
		Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Dokumen
		Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase pengaduan tindak kekerasan terhadap Anak yang ditangani	100%
		Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Penurunan jumlah kasus kekerasan terhadap anak	46 kasus
		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Perangkat Daerah
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM /KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET 2023
		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah korban kekerasan anak yang dirujuk	40 kasus
		Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	41 Orang
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	41 Layanan
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyedia layanan perlindungan khusus yang terbentuk	10 Lembaga
		Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen
		Koordinasi dan Sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Dokumen
3	Meningkatnya Pemenuhan hak anak	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	% lembaga yang memenuhi kriteria layak anak	54,76
		Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga yang menyediakan fasilitas ramah anak	23 lembaga
		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	11 Organisasi
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	7 Dokumen

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM /KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET 2023
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah PKM & Sekolah yang menyediakan fasilitas ramah anak	8 PKM & 35 Sekolah
		Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	60 Orang
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Laporan kinerja pemerintah merupakan wujud nyata instansi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan kepada pemberi mandat atas pelaksanaan kegiatan dan program, hal tersebut dilakukan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran dalam suatu media pelaporan guna mewujutkan Visi dan Misi dari Kepala Daerah.

Capaian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kota Bima diukur berdasarkan tingkat pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja. Pengukuran kinerja tersebut membandingkan antara rencana kinerja dengan realisasinya. Pembahasan berikut menunjukkan pencapaian sasaran strategis dan indikator-indikator kinerjanya sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam Penetapan Kinerja.

Kerangka Pengukuran Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menggunakan peraturan yang ada, *pertama*, untuk melakukan pengukuran dan evaluasi capaian kinerja menggunakan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 dan secara teknis berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, yaitu membandingkan antara target kinerja, indikator, sasaran strategis dan/atau indikator kinerja utama (IKU) yang sudah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja. Berikutnya, *kedua*, dalam melakukan penarikan simpulan terhadap kategori capaian kinerja dengan mengacu pada Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun pengukuran kinerja tersebut dengan rumus sebagai berikut:

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, maka digunakan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

2. Jika ukurannya sebaliknya, yaitu apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran menggunakan interpretasi penilaian dengan pengukuran dengan skala ordinal yaitu :

Tabel 3.1
Interval Capaian Indikator Kinerja Sasaran

No	Interval Nilai Capaian Kinerja	Kategori Penilaian Capaian Kinerja
I	> 90 %	Sangat Tinggi
II	75% s/d 90%	Tinggi
III	65% s/d 75%	Sedang
IV	50% s/d 65%	Rendah
V	< 50 %	Sangat Rendah

Sumber Data: Permendagri 54 tahun 2010

3.1.1 Target Dan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2023

Pengukuran Kinerja Sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima, merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capai) dan masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima Tahun 2023.

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam rencana strategis.

Sasaran yang ingin dicapai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima seperti yang tercantum dalam Penetapan Kinerja Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.2 Target dan Realisasi Perjanjian Kinerja
Indikator Kinerja Utama (IKU)
Tahun 2023**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2022	REALISASI 2022	CAPAIAN 2022
Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	67,81	69,86*	103,02%
Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan Anak	Angka KDRT	0,55%	0,050%	190,84%
	Angka Kekerasan terhadap anak	0,057%	0,076%	65,89%
Meningkatnya Pemenuhan hak anak	Persentase Kecamatan yang memenuhi kriteria layak anak	100%	100%	100,00%

Dari Tabel di atas, dapat diketahui bahwa dari empat Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Tahun 2023, terdapat 3 indikator yang yang mencapai target dan 1 indikator kinerja yang belum mencapai target. Sehingga dapat dikatakan bahwa secara umum pencapaian kinerja bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak cukup berhasil.

Untuk realisasi pada indikator Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) masih diberi tanda bintang dimana angka realisasinya masih mencantumkan angka tahun sebelumnya. Angka realisasi Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Tahun 2023 akan di rilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) sekitar pertengahan Tahun 2024.

Keberhasilan capaian kinerja sasaran di atas, tidak terlepas dari keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan yang menghasilkan outcome dan output program dan kegiatan Tahun 2023. Berikut gambaran capain indikator program dan kegiatan eselon II, III, IV dan Fungsional Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima Tahun 2023, seperti pada table di bawah ini:

Tabel 3.3 Target dan Realisasi Perjanjian Kinerja Eselon II, III dan Fungsional Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM /KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET 2023	Realisasi 2023	Capaian 2023
1	Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase partisipasi perempuan dalam berorganisasi	32,00%	11,13%	34,80%
			Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan dan swasta	47,02%	8,05%	17,12%
			Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan dan swasta	57,40%	106,50%	185,54%
		Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	% SKPD yang melaksanakan PPRG	64,52%	88,24%	136,76%
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	12 dokumen	10 dokumen	83%
		Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	32 Perangkat daerah	30 perangkat daerah	94%
		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah keanggotaan perempuan dalam organisasi kemasyarakatan	80 org	160 orang	200%

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM /KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET 2023	Realisasi 2023	Capaian 2023
		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan Dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Organisasi	30 Organisasi	100%
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Pesentase Lembaga Penyedia Layanan Perempuan yang dibina	50%	35,61%	71,21%
		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	25 lembaga	25 lembaga	100%
		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	25 org	200 org	800%
		Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	5 Dokumen	1 dokumen	20%
2	Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan Anak	Program Perlindungan Perempuan	Persentase pengaduan tindak kekerasan terhadap perempuan yang ditangani	100%	100%	100%
		Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Penurunan jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan	56 kasus	26 kasus	154%

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM /KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET 2023	Realisasi 2023	Capaian 2023
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	2 dokumen	2 dokumen	100%
		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Perangkat daerah	25 Perangkat daerah	100%
		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Porsentase kasus rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang dilayani	100%	100%	100%
		Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	17 Org	26 orang	153%
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	17 Layanan	26 layanan	153%
		Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Persentase pemenuhan data gender dan anak	100%	100%	100%
		Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/kota	Jumlah data kekerasan yang dihasilkan	3 jenis data	3 jenis data	100%

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM /KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET 2023	Realisasi 2023	Capaian 2023
		Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	10 Dokumen	10 Dokumen	100%
		Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Dokumen	4 Dokumen	100%
		Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase pengaduan tindak kekerasan terhadap Anak yang ditangani	100%	100%	100%
		Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Penurunan jumlah kasus kekerasan terhadap anak	46 kasus	39 kasus	115%
		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Perangkat Daerah	30 Perangkat Daerah	100%
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah korban kekerasan anak yang dirujuk	40 kasus	29 kasus	128%
		Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	41 Orang	29 orang	129%

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM /KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET 2023	Realisasi 2023	Capaian 2023
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	41 Layanan	29 layanan	129%
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyedia layanan perlindungan khusus yang terbentuk	10 Lembaga	10 Lembaga	100%
		Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		Koordinasi dan Sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Dokumen	5 Dokumen	100%
3	Meningkatnya Pemenuhan hak anak	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	% lembaga yang memenuhi kriteria layak anak	54,76	54,76%	100%
		Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga yang menyediakan fasilitas ramah anak	23 lembaga	23 Lembaga	100%
		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada	11 Organisasi	11 Organisasi	100%

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM /KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET 2023	Realisasi 2023	Capaian 2023
		Kewenangan Kabupaten/Kota	Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha			
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	7 Dokumen	7 Dokumen	100%
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah PKM & Sekolah yang menyediakan fasilitas ramah anak	8 PKM & 35 Sekolah	8 PKM & 35 sekolah	100%
		Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	60 Orang	60 orang	100%
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	100%

Adapun interval capaian indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.4: Interval Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima Tahun 2023

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2023	REALISA SI 2023	CAPAIAN 2023	Interval Capaian Kinerja (%)				
					≤ 50	50,1 - 65	65,1 - 75	75,1 - 90	≥ 90
Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	67,81	69,86	103,02%					103,02%
Meningkatnya perlindungan	Angka KDRT	0,55%	0,050%	190,84%					190,84%

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2023	REALISASI 2023	CAPAIAN 2023	Interval Capaian Kinerja (%)				
					≤ 50	50,1 - 65	65,1 - 75	75,1 - 90	≥ 90
terhadap perempuan dan Anak	Angka Kekerasan terhadap anak	0,057%	0,076%	65,89%			65,89 %		
Meningkatnya Pemenuhan hak anak	Persentase Kecamatan yang memenuhi kriteria layak anak	100%	100%	100,00%					100,00%

Mencermati tabel diatas diketahui bahwa, dari 4 indikator kinerja sasaran pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima Tahun 2023, 3 (tiga) indicator kinerja sasaran memperoleh kategori sangat tinggi, 1 (satu) indicator kinerja sasaran memperoleh kategori sedang.

Berikut Interval capaian indicator kinerja eselon II, III dan Sub Koordinator Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima Tahun 2023.

Tabel 3.5: Interval Capaian Indikator Kinerja Eselon II, III dan Fungsional Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM /KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET 2023	Realisasi 2023	Capaian 2023	Interval Capaian Kinerja (%)				
							≤ 50	50,1 - 65	65,1 - 75	75,1 - 90	≥ 90
1	Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase partisipasi perempuan dalam berorganisasi	32,00%	11,13%	34,80%	34,80 %				
			Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan dan swasta	47,02%	8,05%	17,12%	17,12 %				
			Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan dan swasta	57,40%	106,50%	185,54 %					185,54 %
		Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	% SKPD yang melaksanakan PPRG	64,52%	88,24%	136,76 %					136,76 %
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	12 dokumen	10 dokumen	83%				83%	

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM /KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET 2023	Realisasi 2023	Capaian 2023	Interval Capaian Kinerja (%)				
							≤ 50	50,1 - 65	65,1 -75	75,1 -90	≥ 90
		Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	32 Perangkat daerah	30 perangkat daerah	94%					93,75%
		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah keanggotaan perempuan dalam organisasi kemasyarakatan	80 org	160 orang	200%					200,00 %
		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan Dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Organisasi	30 Organisasi	100%					100,00 %
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Pesentase Lembaga Penyedia Layanan Perempuan yang dibina	50%	35,61%	71,21%			71,21 %		
		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	25 lembaga	25 lembaga	100%					100,00 %
		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	25 org	200 org	800%					800,00 %
		Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	5 Dokumen	1 dokumen	20%					20,00%
2	Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan Anak	Program Perlindungan Perempuan	Persentase pengaduan tindak kekerasan terhadap perempuan yang ditangani	100%	100%	100%					100,00 %
		Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Penurunan jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan	56 kasus	26 kasus	154%					153,57 %

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM /KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET 2023	Realisasi 2023	Capaian 2023	Interval Capaian Kinerja (%)				
							≤ 50	50,1 - 65	65,1 -75	75,1 -90	≥ 90
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	2 dokumen	2 dokumen	100%					100,00 %
		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Perangkat daerah	25 Perangkat daerah	100%					100,00 %
		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Porcentaje kasus rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang dilayani	100%	100%	100%					100,00 %
		Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	17 Org	26 orang	153%					152,94 %
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	17 Layanan	26 layanan	153%					152,94 %
		Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Persentase pemenuhan data gender dan anak	100%	100%	100%					100,00 %
		Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/kota	Jumlah data kekerasan yang dihasilkan	3 jenis data	3 jenis data	100%					100,00 %
		Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	10 Dokumen	10 Dokumen	100%					100,00 %
		Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Dokumen	4 Dokumen	100%					100,00 %
		Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase pengaduan tindak kekerasan terhadap Anak yang ditangani	100%	100%	100%					100,00 %

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM /KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET 2023	Realisasi 2023	Capaian 2023	Interval Capaian Kinerja (%)				
							≤ 50	50,1 - 65	65,1 -75	75,1 -90	≥ 90
		Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Penurunan jumlah kasus kekerasan terhadap anak	46 kasus	39 kasus	115%					115,22 %
		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Perangkat Daerah	30 Perangkat Daerah	100%					100,00 %
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2 Dokumen	100%					100,00 %
		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah korban kekerasan anak yang dirujuk	40 kasus	29 kasus	128%					127,50 %
		Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	41 Orang	29 orang	129%					129,27 %
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	41 Layanan	29 layanan	129%					129,27 %
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyedia layanan perlindungan khusus yang terbentuk	10 Lembaga	10 Lembaga	100%					100,00 %
		Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	100%					100,00 %

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM /KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET 2023	Realisasi 2023	Capaian 2023	Interval Capaian Kinerja (%)				
							≤ 50	50,1 - 65	65,1 - 75	75,1 - 90	≥ 90
		Koordinasi dan Sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Dokumen	5 Dokumen	100%					100,00 %
3	Meningkatnya Pemenuhan hak anak	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	% lembaga yang memenuhi kriteria layak anak	54,76	54,76%	100%					100,00 %
		Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga yang menyediakan fasilitas ramah anak	23 lembaga	23 Lembaga	100%					100,00 %
		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	11 Organisasi	11 Organisasi	100%					100,00 %
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	7 Dokumen	7 Dokumen	100%					100,00 %
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah PKM & Sekolah yang menyediakan fasilitas ramah anak	8 PKM & 35 Sekolah	8 PKM & 35 sekolah	100%					100,00 %
		Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	60 Orang	60 orang	100%					100,00 %
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	100%					100,00 %

Mencermati tabel diatas diketahui bahwa, dari 7 (tujuh) indikator kinerja program atau indikator eselon II yang diperjanjikan, 5 (lima) indikator memiliki interval > 90 (sangat baik) dan 2 (dua) indikator memiliki interval < 50 (sangat rendah). Untuk indikator kinerja kegiatan atau indikator eselon III, dari 11 (sebelas) indikator kinerja yang diperjanjikan, sebanyak 10 (sepuluh) indikator memiliki

interval > 90 (sangat baik dan 1 (satu) indikator memiliki interval 65,1-75 (sedang). Sedangkan Untuk indicator kinerja sub kegiatan atau indicator Sub Koordinator, dari 22 (dua puluh dua) indikator kinerja sub kegiatan yang diperjanjikan, sebanyak 19 (sembilan belas) indikator memiliki interval > 90 (sangat baik), 2 (dua) indikator memiliki interval 75,1-90 (Tinggi) dan 1 (satu) indikator memiliki interval < 50 (Sangat Rendah).

3.1.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Dengan Tahun 2022 Serta Target Kinerja Renstra 2018-2023.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima Tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi capaian indikator tahun 2023 dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran pada tahun sebelumnya.

Pencapaian Sasaran Strategis I :

Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan

Ketidaksetaraan gender masih menjadi isu besar meskipun sudah mengalami perubahan yang signifikan dalam dekade terakhir. Ketidaksetaraan gender ini ditandai dengan adanya ketimpangan relasi/kondisi (perbedaan, akses, partisipasi, kontrol, manfaat pembangunan) bagi laki-laki dan perempuan yang dipengaruhi oleh budaya dan kebijakan.

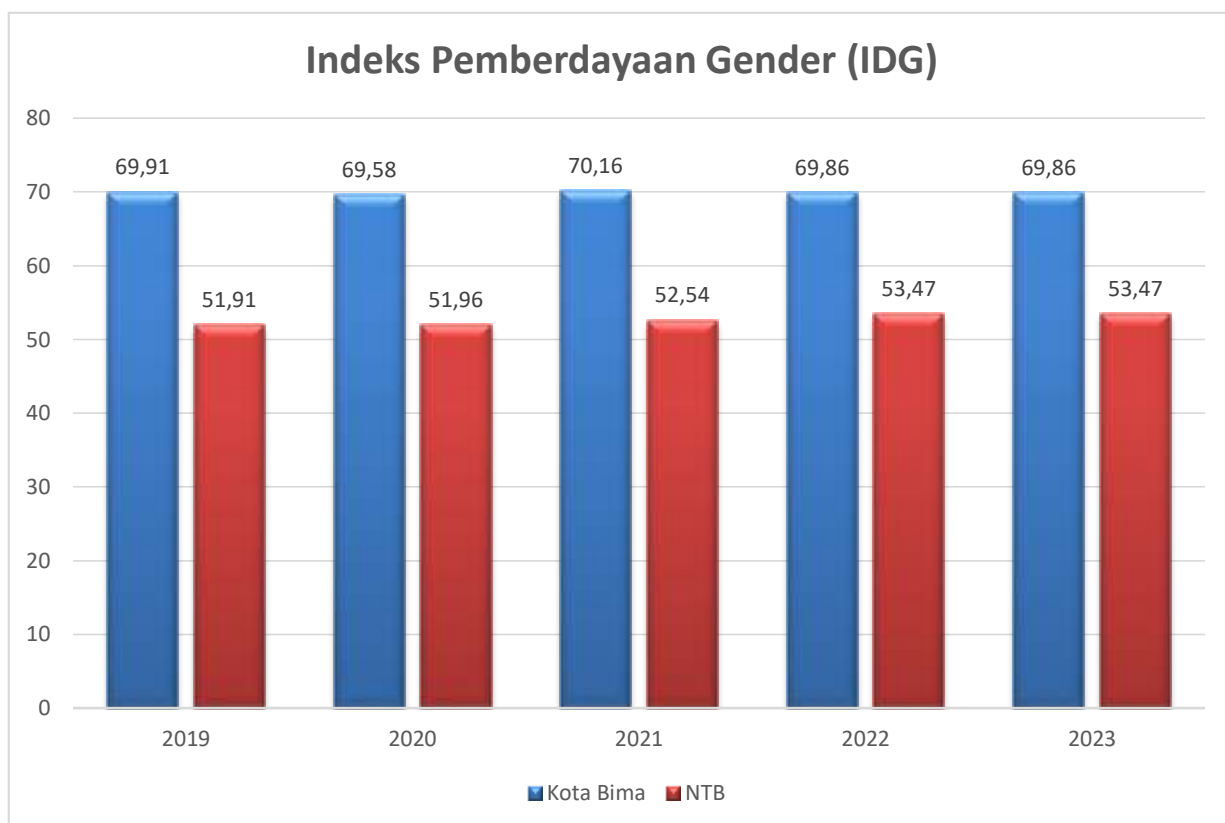
Gender dibedakan sebagai perbedaan fungsi dan peran sosial antara laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi oleh masyarakat. Perbedaan tersebut pada praktiknya sering menimbulkan ketidakadilan, terutama terhadap kaum perempuan baik di lingkungan rumah tangga, pekerjaan masyarakat kultur, maupun negara. Oleh sebab itu untuk menghilangkan ketidakadilan tersebut diperlukan adanya kesetaraan dan keadilan gender dalam proses bermasyarakat dan bernegara.

Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi perempuan dan laki-laki untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.

Pembangunan gender bertujuan untuk mewujudkan persamaan kualitas pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai dimensi kehidupan. Meski masih belum menyamai laki-laki, kualitas pembangunan perempuan di Kota Bima selalu menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu. Hal ini tidak terlepas dari berbagai upaya yang terkait dengan pemberdayaan gender.

Adapun perbandingan ralisasi kinerja sasaran I pada masing-masing indikator tersebut dapat di lihat pada gambar sebagai berikut:

Gambar 1: Indeks Pemberdayaan Gender Tahun 2019 - 2023



Untuk sasaran I yaitu Meningkatnya Partisipasi Perempuan Dalam Pembangunan terdapat satu indikator yang dijadikan ukuran. Dari gambar di atas diketahui bahwa indikator Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 mengalami fluktuatif, Dimana capaian tertinggi terjadi pada tahun 2022 yaitu sebesar 70,16%, sedangkan terendah terjadi pada tahun 2020 yaitu sebesar 69,58%.

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kota Bima menunjukkan angka yang lebih tinggi bila dibandingkan dengan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Provinsi NTB dari tahun ke tahun.

Adapun perbandingan tingkat capaian kinerja indikator sasaran I yaitu Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) tahun 2023 dengan capaian kinerja tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.6 Tingkat Capaian Kinerja Sasaran I Tahun 2023 Dibandingkan dengan Tahun 2022

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CAPAIAN 2022	TARGET 2023	REALISASI 2023	CAPAIAN 2023	Bertambah / Berkurang
Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	105,39%	67,81	69,86	103,02%	-2,36%

Dari tabel diatas diketahui bahwa, capain kinerja indikator Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Tahun 2023 sudah melebihi target yaitu sebesar 103,02%. Namun capaian kinerja tersebut mengalami penurunan sebesar (2,36%) bila dibandingkan dengan capaian Tahun 2022 sebesar 105,39%.

Jika dibandingkan dengan target akhir tahun kelima Renstra 2018 – 2023, dimana Tahun 2023 merupakan Tahun akhir periode renstra 2018-2023 dengan target pada akhir periode sebesar 67,81%, maka capaian kinerja sasaran strategis I indikator Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) adalah sebesar 103,02%. Hal ini menunjukkan capaian kinerja renstra sudah melebihi 100% sehingga perlu dipertahankan dan ditingkatkan pada periode renstra berikutnya.

Adapun perbandingan tingkat capaian kinerja indikator sasaran I yaitu Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) tahun 2023 dengan capain kinerja Renstra 2018-2023 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.7 Tingkat Capaian Kinerja Sasaran I Tahun 2023 Dibandingkan dengan Capain Kinerja Renstra 2018-2023

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	REALISASI 2023	TARGET RENSTRA 2018-2023	CAPAIAN 2023
Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	69,86	67,81	103,02

Pencapaian target kinerja Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) merupakan kemajuan dalam hal kesetaraan gender.

Faktor yang mendorong tercapainya target kinerja indikator sasaran I adalah sebagai berikut:

1. Adanya komitmen pimpinan daerah terkait upaya peningkatan pemberdayaan perempuan.
2. Adanya pembinaan pada organisasi-organisasi perempuan berkelanjutan di Kota Bima.
3. Adanya Pelatihan Kewirausahaan pada kelompok-kelompok usaha perempuan.
4. Adanya kerja sama dengan berbagai lintas sector terkait pembinaan dan pelatihan pada kelompok-kelompok usaha perempuan.
5. Pemberian bantuan berupa peralatan produksi jajanan baik kering maupun basah, perlengkapan catering, alat pembuat bawang goreng, alat tenun, alat press bata, dan mesin obras pada kelompok-kelompok usaha perempuan.

Kualitas pemberdayaan perempuan di Kota Bima selalu menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu, meski masih belum menyamai laki-laki. Dalam

rangka mewujudkan persamaan gender dalam berbagai dimensi kehidupan, terdapat beberapa faktor yang menghambat antara lain:

1. Belum meratanya pemahaman tentang kesetaraan gender dan konsep strategi pengarusutamaan gender di kalangan pengambil keputusan baik di eksekutif, legislatif dan yudikatif, serta masyarakat karena budaya patriarki, pola pikir tradisional dan interpretasi agama.
2. Hambatan berpartisipasi secara politis berasal dari perempuan sendiri. Pencitraan perempuan sebagai makhluk lemah, tidak mandiri, kurang tanggung jawab yang sudah meresap di alam bawah sadar, dirasakan oleh perempuan sebagai fitrah, bawaan dan kodrati.
3. Motivasi dari para perempuan untuk terlibat aktif dalam usaha peningkatan kesejahteraan keluarga sejahtera maupun dalam berpolitik masih rendah.

Untuk peningkatan kinerja kedepan, maka langkah-langkah strategis yang akan diambil oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima adalah (1) Mendorong setiap Perangkat Daerah (PD) untuk memahami bahwa isu gender sudah menjadi isu bersama dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender, (2) Menyelenggarakan Pendidikan politik perempuan secara berkelanjutan dalam rangka pengkaderan caleg perempuan dengan kualitas yang mampu bersaing dengan kaum laki-laki (3) Mendorong dimudahkannya pemberian bantuan modal/kredit usaha pada kelompok-kelompok usaha perempuan hasil kerjasama dengan berbagai lintas sector, terutama dengan pihak perbankan, guna menumbuhkan minat usaha dalam rangka meningkatkan nilai pendapatan bagi perempuan, (4) selain itu diupayakan terbentuknya sekolah perempuan pada masing-masing kelurahan dalam rangka peningkatan pengetahuan dan keterampilan bagi kaum perempuan.

Dalam mencapai target kinerja sasaran strategis tersebut telah dilaksanakan 1 (satu) program yaitu (1) Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan, dengan didukung berbagai kegiatan antara lain: (1) Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah, (2) Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota, (3) Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota, serta di dukung oleh 5 (lima) sub kegiatan antara lain (1) Sub Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi Pelaksanaan PUG kewenangan PUG termasuk PPRG, (2) Sub Kegiatan Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG, (3) Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG, (4) Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota serta (5) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Perempuan

Kewenangan Kota/Kabupaten (6) Sub Kegiatan Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kota/Kabupaten.

Adapun perbandingan capaian realisasi indikator eselon II, III dan koordinator yang mendukung pencapaian sasaran strategis I Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima antara Tahun 2023 dengan tahun 2022, dapat dilihat pada table sebagai berikut:

Tabel 3.8: Perbandingan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Eselon II, III dan Koordinator Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima Tahun 2023 dengan Tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM /KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET 2023	Realisasi 2023	Capaian 2023	TARGET 2022	Realisasi 2022	Capaian 2022
1	Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase partisipasi perempuan dalam berorganisasi	32,00%	11,13%	34,80%	32,00%	9,58%	29,92%
				Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan dan swasta	47,02%	8,05%	17,12%	47,02%	37,23%	79,18%
				Persentase peningkatan bidang usaha ekonomi perempuan	57,40%	106,50%	185,54%			
			Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	% SKPD yang melaksanakan PPRG	64,52%	88,24%	136,76%	48,39%	35,29%	72,94%
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan SKPD hasil pelaksanaan kegiatan PUG Termasuk PPRG				12 Dokumen	12 Dokumen	100%
				Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	12 dokumen	10 dokumen	83%			
			Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Peserta Sosialisasi PUG				50 org	30 org	60%
				Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	32 Perangkat daerah	30 perangkat daerah	94%			
			Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah keanggotaan perempuan dalam organisasi kemasyarakatan	80 org	160 orang	200%	70 org	78 org	130%
			Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan Dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Organisasi perempuan yang dibina				30 organisasi	48 organisasi	160%

NO	SASARAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM /KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET 2023	Realisasi 2023	Capaian 2023	TARGET 2022	Realisasi 2022	Capaian 2022
				Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Organisasi	30 Organisasi	100%			
			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Pesentase Lembaga Penyedia Layanan Perempuan yang dibina	50%	35,61%	71,21%	40%	76,92%	192,30%
			Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan	- jumlah kelompok usaha ekonomi perempuan yang mendapatkan pelatihan				25 kelompok	0 kelompok	0%
				Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	25 lembaga	25 lembaga	100%			
			Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	25 org	200 org	800%			
			Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan	Jumlah Rumah Aspirasi yang terbentuk				5 kelp	6 klp	120%
				Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	5 Dokumen	1 dokumen	20%			

Dari tabel di atas diketahui bahwa capaian rata-rata indikator Program yang mendukung atas pencapaian kinerja sasaran strategis I Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki capaian sebesar 79,15%, mengalami peningkatan 24,60% bila dibandingkan dengan capaian rata-rata pada Tahun 2022 sebesar 54,55%. Sedangkan untuk Indikator Kegiatan pada tahun 2023 merupakan Indikator Kinerja eselon III. Adapun indikator Kegiatan yang mendukung atas pencapaian kinerja sasaran strategis I Tahun 2023 memiliki capaian rata-rata sebesar 135,99%, mengalami kenaikan 4,24% bila dibandingkan dengan capaian rata-rata pada Tahun 2022 sebesar 131,75%. Semenjak Tahun 2022 terdapat perubahan struktur kepegawaian yang sebelumnya merupakan jabatan struktural setingkat eselon IV, kini berubah menjadi jabatan fungsional (koordinator) yang bertanggung jawab pada pencapaian indikator sub kegiatan. Adapun indikator Sub Kegiatan yang mendukung atas pencapaian kinerja sasaran strategis I Tahun 2023 memiliki capaian rata-rata sebesar 199,51%, mengalami kenaikan sebesar 111,51% bila dibandingkan dengan capaian rata-rata pada Tahun 2022 sebesar 88,00% .

Untuk keberhasilan capaian indikator kinerja sasaran I, dibutuhkan dukungan 1 (satu) program dengan 3 (tiga) kegiatan dan 6 (enam) sub kegiatan. Dari hasil analisis efisiensi penggunaan sumber daya tersebut dapat dikatakan bahwa pencapaian indikator kinerja sasaran Meningkatnya Partisipasi Perempuan Dalam Pembangunan dilakukan dengan penggunaan sumber daya yang efisien, karena capaian kinerja menunjukkan persentase keberhasilan yang lebih tinggi dari pada persentase realisasi penggunaan dana. Adapun gambaran penggunaan anggaran untuk pencapaian indikator sasaran tersebut yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.9: Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Anggaran Untuk Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran I Tahun 2023

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2023	REALISASI 2023	CAPAIAN 2023	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	% PENYERAPAN	EFISIENSI
Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	67,81	69,86	103,02%	4.742.196.580	4.583.264.111	96,65	Efisien

Dari tabel di atas diketahui bahwa terdapat efisiensi sumber daya yang digunakan dalam pencapaian indikator kinerja Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) pada sasaran strategis I yaitu sebesar Rp. 158.932.469 (3,35%).

Pencapaian Sasaran Strategis II :

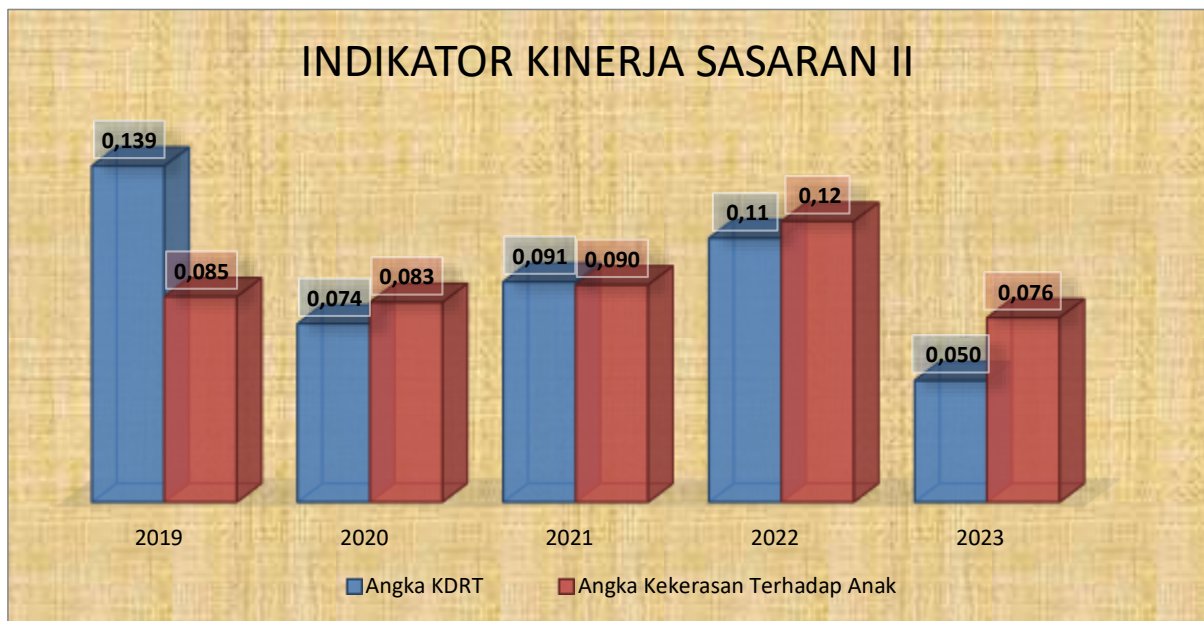
Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan Anak

Perlindungan perempuan adalah segala upaya yang ditujukan untuk melindungi perempuan dan memberikan rasa aman dalam pemenuhan hak-haknya dengan memberikan perhatian yang konsisten dan sistematis yang ditujukan untuk mencapai kesetaraan gender.

Sedangkan Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Adapun perbandingan capaian kinerja sasaran II pada masing-masing indikator tersebut dapat di lihat pada gambar sebagai berikut:

Gambar 2: Realisasi Indikator Kinerja Sasar II Tahun 2019 s/d 2023



Untuk sasaran II yaitu Meningkatkan perlindungan terhadap perempuan dan Anak terdapat dua indikator yang dijadikan ukuran. Dari gambar di atas diketahui bahwa indikator Angka KDRT dari Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2022 mengalami fluktuatif dan cenderung trus meningkat, namun pada tahun 2023 mengalami penurunan yang sangat signifikan yaitu sebesar 0,050% bila dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar 0,11%. Untuk indikator Angka Kekerasan Terhadap Anak mulai dari Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2022 juga mengalami tren fluktuatif dan cenderung meningkat, namu pada tahun 2023 mengalami penurunan yang signifikan bila dibanding pada tahun-tahun sebelumnya yaitu sebesar 0,076%.

Adapun perbandingan tingkat capaian kinerja indikator sasaran II yaitu Angka Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Angka Kekerasan Terhadap Anak

Tahun 2023 dengan capain kinerja tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.10 Tingkat Capaian Kinerja Sasaran II Tahun 2023 Dibandingkan dengan Tahun 2022

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CAPAIAN 2022	TARGET 2023	REALISASI 2023	CAPAIAN 2023	Bertambah / Berkurang
Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan Anak	Angka KDRT	180,46%	0,55%	0,050%	190,84%	10,38%
	Angka Kekerasan terhadap anak	-4,26%	0,057%	0,076%	65,89%	70,15%

Dari tabel diatas diketahui bahwa, capain kinerja indikator Angka Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Tahun 2023 sudah melebihi target yaitu sebesar 190,84%, mengalami peningkatan sebesar 10,38% bila dibandingkan dengan capaian kinerja Tahun 2022 sebesar 180,46%. Sedangkan untuk capaian kinerja indikator Angka Kekerasan Terhadap Anak belum mencapai target yaitu sebesar 65,89, mengalami peningkatan sebesar 70,15% bila dibandingkan dengan capaian Tahun 2022 sebesar -4,26%.

Adapun perbandingan tingkat capaian kinerja indikator sasaran II yaitu indikator Angka Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan indikator Angka Kekerasan Terhadap Anak Tahun 2023 dengan capain kinerja Renstra 2018-2023 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.11. Tingkat Capaian Kinerja Sasaran II Tahun 2023 Dibandingkan dengan Capain Kinerja Renstra 2018-2023

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	REALISASI 2023	TARGET RENSTRA 2018-2023	CAPAIAN 2023
Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan Anak	Angka KDRT	0,050%	0,55%	190,84
	Angka Kekerasan terhadap anak	0,076%	0,057%	66,58

Dari tabel di atas diketahui bahwa, jika dibandingkan dengan target akhir tahun kelima Renstra 2018 – 2023, dimana target pada akhir tahun kelima Indikator Angka Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sebesar 0,55%, maka capaian kinerja sasaran strategis II indikator Angka Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah sebesar 190,84%. Hal ini menunjukkan capaian kinerja renstra sudah melebihi 100% sehingga perlu dipertahankan pada periode renstra berikutnya. Untuk indikator Angka Kekerasan Terhadap Anak dibandingkan dengan target akhir tahun kelima Renstra 2018 – 2023, dimana target pada akhir tahun kelima sebesar 0,057%, maka tingkat kemajuan capaian kinerja sasaran strategis II indikator Angka

Kekerasan Terhadap Anak adalah sebesar 66,58%. Hal ini menunjukkan capaian kinerja renstra belum mencapai target dan berada pada interval kategori sedang (65,1 s/d 75), sehingga perlu kerja keras lagi untuk meningkatkan capaian pada periode renstra berikutnya.

Salah satu akibat dari terjadinya KDRT dan kekerasan lainnya yaitu dapat menimbulkan penderitaan fisik, psikis, seksual, ekonomi, dan sosial. Dampak yang ditimbulkan pun sedemikian kompleks serta penderitaan yang dialami korban akan membekas sepanjang hidupnya.

Kemajuan teknologi informasi yang semakin terjangkau oleh masyarakat mempercepat tingginya kejadian kasus kekerasan, hal ini menjadi salah satu factor pemicu meningkatnya kasus pelecehan terutama pada anak, sehingga memerlukan langkah-langkah preventif dan antisipatif.

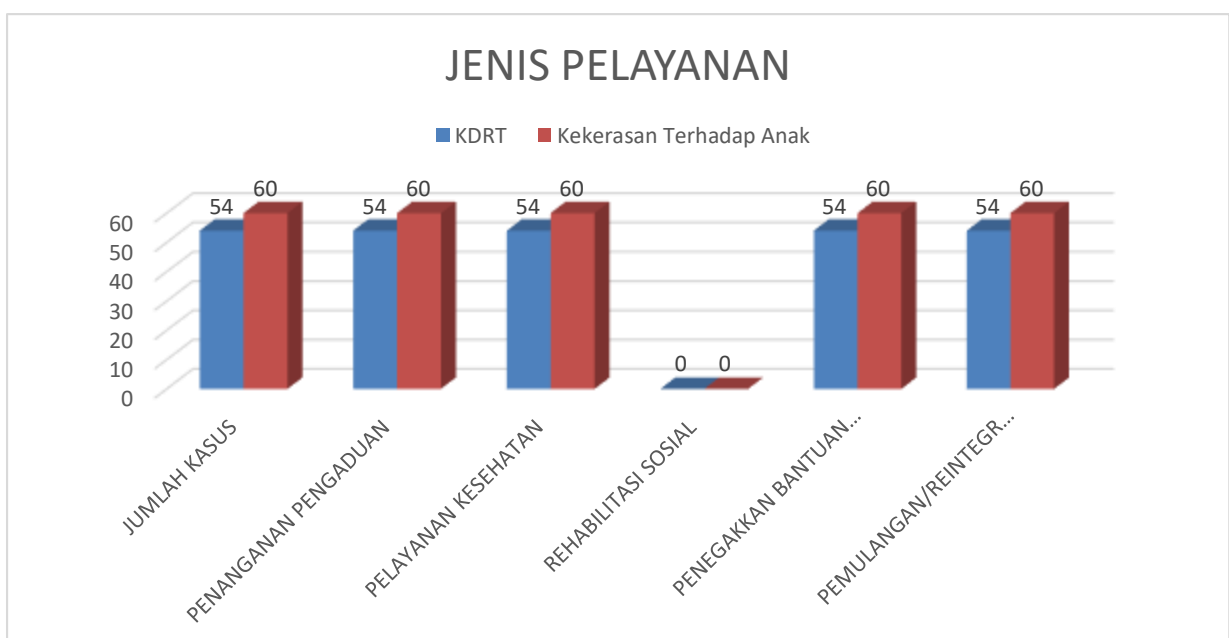
Tingginya kasus kekerasan dalam rumah tangga terutama terhadap perempuan dan anak membutuhkan dukungan dari seluruh masyarakat untuk ikut serta berperan aktif mendukung pemerintah dalam pencegahan dan penanganan kekerasan ini.

Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap perbuatan yang berkaitan atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan, secara fisik, seksual, psikologis, ancaman perbuatan tertentu, pemaksaan dan perampasan kebebasan baik yang terjadi di lingkungan masyarakat maupun di lingkungan rumah tangga.

Lima jenis layanan yang merupakan hak korban yaitu layanan pengaduan, kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, serta pemulangan dan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan.

Berikut adalah pelayanan kasus kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan terhadap anak yang telah dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima selama Tahun 2023.

Gambar 3: Pelayanan Kasus KDRT dan Kasus Kekerasan Terhadap Anak Tahun 2023



Dari gambar di atas diketahui bahwa, hampir semua kasus KDRT dan kekerasan kepada anak 100% telah mendapatkan pelayanan yang optimal.

Faktor yang mendorong tercapainya target kinerja indikator sasaran II adalah sebagai berikut:

1. Adanya dukungan regulasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak
 - a. Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.
 - b. Undang-undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan saksi dan korban.
 - c. Undang-undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan tindak pidana perdagangan orang.
 - d. Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak.
2. Adanya kegiatan dialog warga terkait Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) di Kelurahan, yang dilakukan secara bertahap pada seluruh Kelurahan yang ada di Kota Bima.
3. Adanya pembentukan Forum Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) di Kelurahan.
4. Adanya pelatihan kader Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) di Kelurahan.
5. Adanya Pembentukan Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak (Satgas PPA) di Kelurahan.

Walaupun pada tahun 2023 capaian indikator kinerja sasaran II yaitu Angka KDRT dan Angka Kekerasan Terhadap Anak masih dibawah target kinerja, namun kejadian kasus KDRT dan Kekerasan terhadap anak dari tahun ke tahun masih cukup tinggi. Hal ini disebabkan beberapa faktor antara lain sebagai berikut:

1. Faktor Individu dimana pengetahuan korban maupun keluarga yang masih kurang tentang pencegahan kekerasan.
2. Faktor Ekonomi dimana terdapat orang tua yang menjadi TKW sehingga anak kurang mendapat perhatian dan pengawasan dari orang tua. Serta perceraian orang tua dimana anak dititipkan dan diasuh oleh orang lain.
3. Faktor Sosial Budaya, dampak buruk dari sosial media dimana ada tontonan yang tidak mendidik bahkan berbau pornografi, yang banyak memicu terjadinya kekerasan seksual baik pada perempuan maupun anak.

Selain faktor-faktor di atas, tingginya kasus kekerasan yang terjadi terhadap perempuan dan anak di Kota Bima adalah sudah terbentuknya lembaga-lembaga layanan perlindungan perempuan dan anak di beberapa kelurahan sehingga akses masyarakat untuk melapor apabila terjadi kasus kekerasan terhadap perempuan dan

anak semakin terjangkau, serta masyarakat semakin sadar akan hak-hak korban kekerasan. Dimana sebelumnya terdapat persepsi masyarakat terhadap kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak harus ditutup rapat karena dianggap merupakan masalah keluarga dan bukan masalah social.

Untuk peningkatan kinerja kedepan, maka langkah-langkah strategis yang akan diambil oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima adalah meningkatkan sosialisasi berkelanjutan terkait penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak, pembentukan dan bimbingan teknis satgas PPA dan aktivis PATBM, perbaikan sistim pencatatan dan pelaporan kasus, mengoptimalkan Puspaga dan pembentukan KPAD Kota Bima. Pemantapan dan penguatan kelembagaan yang menangani bidang perlindungan perempuan dan anak, koordinasi berkelanjutan dan membangun komitmen dengan pihak-pihak terkait, mengoptimalkan pelaksanaan monitoring/evaluasi baik secara dokumentatif dan aplikatif dengan turut melibatkan potensi jejaring yang telah dibentuk dan tersebar di beberapa kelurahan.

Dalam mencapai target kinerja sasaran strategis tersebut telah dilaksanakan 3 (tiga) program, 6 (enam) kegiatan serta 11 (Sebelas) sub kegiatan yaitu antara lain:

1. Program Perlindungan Perempuan
 - a. Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah
 - 1) Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan
 - 2) Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan
 - b. Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota
 - 1) Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
 - 2) Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
2. Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak
 - a. Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/kota
 - 1) Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota
 - 2) Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota
3. Program Perlindungan Khusus Anak
 - a. Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota.

- 1) Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
- b. Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
 - 1) Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
 - 2) Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota
- c. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
 - 1) Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
 - 2) Koordinasi dan Sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus.

Adapun perbandingan capaian realisasi indikator eselon II, III dan eselon IV yang mendukung pencapaian sasaran strategis II Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima antara Tahun 2023 dengan tahun 2022, dapat dilihat pada table sebagai berikut:

Tabel 3.12. Perbandingan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Eselon II, III dan IV Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima Tahun 2023 dengan Tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM /KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET 2023	Realisasi 2023	Capaian 2023	TARGET 2022	Realisasi 2022	Capaian 2022
2	Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan Anak	Program Perlindungan Perempuan	Persentase pengaduan tindak kekerasan terhadap perempuan yang ditangani	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	% Pernikahan pasangan usia dini				4,50%	6,40%	57,78%
			Penurunan jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan	56 kasus	26 kasus	154%			
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan	Jumlah Peserta Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan				50 org	100 org	200%
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	2 dokumen	2 dokumen	100%			
		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan	Jumlah peserta Sosialisasi penghapusan kekerasan terhadap perempuan				50 org	20 org	40%
			Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Perangkat daerah	25 Perangkat daerah	100%			
		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Porsentase kasus rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang dilayani	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Satgas PPA yang terbentuk				13 kel	11 kel	85%
			Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	17 Org	26 orang	153%			
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pelayanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan				43 kss	33 kss	77%

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM /KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET 2023	Realisasi 2023	Capaian 2023	TARGET 2022	Realisasi 2022	Capaian 2022
			Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	17 Layanan	26 layanan	153%			
		Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Persentase pemenuhan data gender dan anak	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/kota	Jumlah data kekerasan yang dihasilkan	3 jenis data	3 jenis data	100%	3 jenis data	3 jenis data	100%
		Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Penyusunan dokumen data Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak				10 dok	10 dok	100%
			Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	10 Dokumen	10 Dokumen	100%			
		Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Pelaksanaan pengimputan data pada aplikasi SIMPONI				4 kl	4 kl	100%
			Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Dokumen	4 Dokumen	100%			
		Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase pengaduan tindak kekerasan terhadap Anak yang ditangani	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Penurunan jumlah kasus kekerasan terhadap anak	46 kasus	39 kasus	115%	39 kss	60 kss	46%
		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Perangkat Daerah	30 Perangkat Daerah	100%			
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah peserta sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap anak				50 org	200 org	400%
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2 Dokumen	100%			

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM /KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET 2023	Realisasi 2023	Capaian 2023	TARGET 2022	Realisasi 2022	Capaian 2022
		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah korban kekerasan anak yang dirujuk	40 kasus	29 kasus	128%	40 kasus	60 kasus	150%
		Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kasus perlindungan khusus yang dilayani				17 orang	24 orang	141%
			Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	41 Orang	29 orang	129%			
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kasus perlindungan khusus yang dilakukan pendampingan				12 kss	24 kss	200%
			Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	41 Layanan	29 layanan	129%			
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyedia layanan perlindungan khusus yang terbentuk	10 Lembaga	10 Lembaga	100%	10 Lembaga	15 Lembaga	150%
		Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Pelatihan PATBM				50 org	50 org	100%
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	100%			
		Koordinasi dan Sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus	Jumlah kelompok Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) yang terbentuk				10 kelompok PATBM	15 kelompok PATBM	150%
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Dokumen	5 Dokumen	100%			

Pada Tahun 2023 Indikator Program merupakan indicator kinerja pada level eselon II. Dari table di atas diketahui bahwa pada Tahun 2023 indikator Program yang mendukung atas pencapaian kinerja sasaran strategis II memiliki capaian rata-rata sebesar 100,00%, sama dengan capaian rata-rata pada Tahun 2022 sebesar 100,00%. Sedangkan untuk Indikator Kegiatan pada tahun 2023 merupakan Indikator Kinerja eselon III. Adapun indikator Kegiatan yang mendukung atas pencapaian kinerja sasaran strategis II Tahun 2023 memiliki capaian rata-rata sebesar 116,05% mengalami kenaikan 15,39% bila dibandingkan dengan capaian rata-rata pada Tahun 2022 sebesar 100,66%. Sedangkan pada tahun 2022 terjadi perubahan jabatan untuk eselon IV menjadi fungsional yang bertanggungjawab untuk capaian indikator sub kegiatan. Adapun indikator Sub Kegiatan yang mendukung atas pencapaian kinerja sasaran strategis II Tahun 2023 memiliki capaian rata-rata sebesar 113,70%, mengalami penurunan -31,07% bila dibandingkan dengan Tahun 2022 yaitu sebesar 144,78%%.

Untuk keberhasilan capaian indikator kinerja sasaran II, dibutuhkan dukungan 3 (tiga) program dengan 6 (enam) kegiatan dan 11 (Sebelas) sub kegiatan. Dari hasil analisis efisiensi penggunaan sumber daya tersebut dapat dikatakan bahwa pencapaian indikator kinerja sasaran Meningkatnya Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak dilakukan dengan penggunaan sumber daya yang efisien. Dari dua indicator kinerja sasaran II, satu indikator capaian kerjanya menunjukkan persentase keberhasilan yang lebih tinggi dari pada persentase realisasi penggunaan dana yaitu pada indicator Angka KDRT. Demikian pula dengan penggunaan sumberdaya pada capaian indicator Angka Kekerasan Terhadap Anak, walaupun dari segi persentase penyerapan anggarannya lebih tinggi dari persentase capaian indikator kinerja sasaran. Adapun gambaran penggunaan anggaran untuk pencapaian indicator sasaran tersebut yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.13: Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Anggaran Untuk Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran II Tahun 2023

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2023	REALISASI 2023	CAPAIAN 2023	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	% PENYERAPAN	EFISIENSI
Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan Anak	Angka KDRT	0,55%	0,050%	190,84%	427.913.800	363.336.580	84,91	Efisien
	Angka Kekerasan terhadap anak	0,057%	0,076%	65,89%	915.840.600	860.796.670	93,99	Efisien

Dari tabel di atas diketahui bahwa terdapat efisiensi sumber daya yang digunakan dalam pencapaian Indikator Kinerja Angka KDRT pada sasaran strategis III yaitu sebesar 64.577.220 (15,09%). Demikian juga terdapat efisiensi sumber daya yang digunakan dalam pencapaian Indikator Angka Kekerasan Terhadap Anak yaitu sebesar 55.043.930 (6,01%).

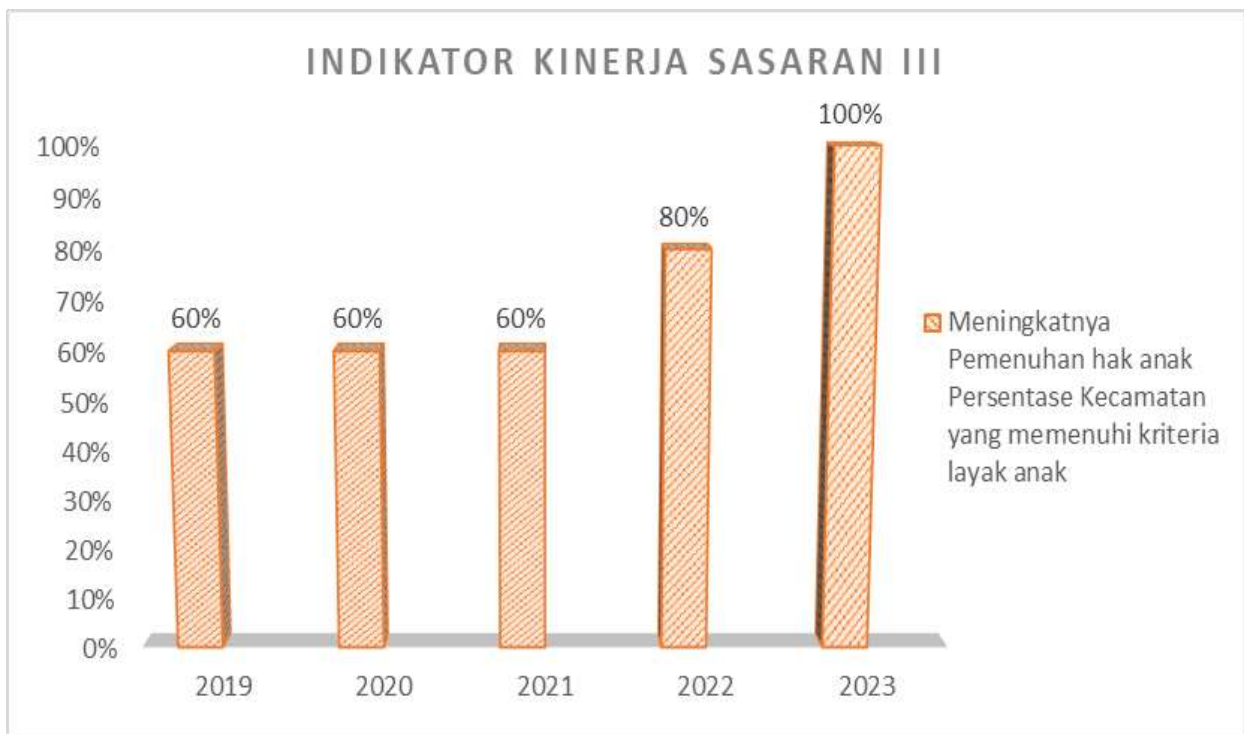
Pencapaian Sasaran Strategis III :

Meningkatnya Pemenuhan hak anak

Isu hak dan perlindungan anak, bukan hanya isu daerah tertentu, melainkan menjadi isu nasional dan internasional. Perhatian terhadap anak, dalam artian memenuhi hak dan memberikan perlindungan merupakan faktor penting, karena anak adalah manusia muda yang rentan, bergantung, lugu, dan memiliki kebutuhan-kebutuhan khusus. Sehingga Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Adapun perbandingan capaian indikator kinerja untuk sasaran III dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:

Gambar 4: Realisasi Indikator Kinerja Sasaran III Tahun 2019 s/d 2023



Untuk sasaran III yaitu Meningkatkan Pemenuhan hak anak terdapat satu indikator yang dijadikan ukuran. Dari gambar di atas diketahui bahwa indikator Persentase Kecamatan yang memenuhi kriteria layak anak dari Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023. Persentase Kecamatan yang memenuhi kriteria layak anak capaian kinerja Tahun 2023 sudah memenuhi target adalah 100%, dari target sebesar 100% atau dengan prosentase capaian kinerja 100%.

Adapun perbandingan tingkat capaian kinerja indikator sasaran III yaitu Persentase Kecamatan yang memenuhi kriteria layak anak Tahun 2023 dengan capaian kinerja tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.14 Tingkat Capaian Kinerja Sasaran III Tahun 2023 Dibandingkan dengan Tahun 2022

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CAPAIAN 2022	TARGET 2023	REALISASI 2023	CAPAIAN 2023	Bertambah / Berkurang
Meningkatnya Pemenuhan hak anak	Persentase Kecamatan yang memenuhi kriteria layak anak	100,00%	100%	100%	100,00%	0,00%

Dari tabel diatas diketahui bahwa, capain kinerja indikator Persentase Kecamatan yang memenuhi kriteria layak anak Tahun 2023 sudah memenuhi target yaitu sebesar 100%. Sehingga capaian kinerja indikator tahun 2023 sama dengan capaian indikator tahun 2022 yaitu 100%.

Adapun perbandingan tingkat capaian kinerja indikator sasaran III yaitu Persentase Kecamatan yang memenuhi kriteria layak anak Tahun 2023 dengan capain kinerja Renstra 2018-2023 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.15 Tingkat Capaian Kinerja Sasaran III Tahun 2023 Dibandingkan dengan Capain Kinerja Renstra 2018-2023

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	REALISASI 2023	TARGET RENSTRA 2018-2023	CAPAIAN 2023
Meningkatnya Pemenuhan hak anak	Persentase Kecamatan yang memenuhi kriteria layak anak	100%	100%	100,00

Dari tabel di atas diketahui bahwa, jika dibandingkan dengan target akhir tahun kelima Renstra 2018 – 2023, dimana target pada akhir tahun kelima sebesar 100%, maka capaian kinerja sasaran strategis III indikator Persentase Kecamatan yang memenuhi kriteria layak anak adalah sebesar 100%. Hal ini menunjukkan capaian kinerja renstra sudah mencapai 100%, sehingga perlu dipertahankan lagi pada periode renstra berikutnya.

Kota Layak Anak (KLA) merupakan wujud komitmen pemerintah untuk menggerakkan semua sumber daya yang dimiliki dalam rangka pemenuhan hak-hak anak diberbagai bidang, sehingga menjadikan Kota Bima sebagai Kota Layak Anak.

Kota Layak Anak adalah kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin pemenuhan hak dan perlindungan anak. Sistem pembangunan kota berbasis hak anak menempatkan anak dalam arus utama pembangunan. Hak dan perlindungan anak dijadikan acuan dalam perencanaan pembangunan kota, sehingga kota yang dibangun bisa

bersahabat dengan anak, dan menjadi lingkungan yang kondusif bagi tumbuh kembang anak. Untuk menuju Kota Layak Anak (KLA) sejumlah prasyarat harus dipenuhi. Salah satunya mewujudkan Kecamatan Layak Anak.

Kecamatan ini dikategorikan sebagai Kecamatan layak anak dimana ditunjang oleh beberapa indikator seperti tersedianya kelembagaan ramah anak (puskesmas rama anak, sekolah ramah anak, PATBM, Forum Anak, Gugus Tugas Kecamatan Layak Anak), tersedianya ruang laktasi, tersedianya ruang bermain untuk anak.

Adapun Indikator Kecamatan Layak Anak adalah sebagai berikut :

- a) Penguatan kelembagaan
 - 1) Adanya peraturan perundang-undangan dan kebijakan untuk pemenuhan hak anak.
 - 2) Persentase anggaran untuk pemenuhan hak anak, termasuk anggaran untuk penguatan kelembagaan.
 - 3) Jumlah peraturan perundang-undangan, kebijakan, program dan kegiatan yang mendapatkan masukan dari Forum anak dan kelompok lainnya.
 - 4) Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) terlatih KHA dan mampu menerapkan hak anak kedalam kebijakan, program dan kegiatan.
 - 5) Tersedia data anak terpilah menurut jenis kelamin, umur, dan kecamatan.
 - 6) Keterlibatan lembaga masyarakat dalam pemenuhan hak anak.
 - 7) Keterlibatan dunia usaha dalam pemenuhan hak anak.
- b) Untuk pemenuhan indicator tersebut di atas, terbagi menjadi 5 klaster sebagai berikut :
 - * **Klaster I** : Hak sipil dan kebebasan
 - 1) Persentase anak yang terintegrasi dan mendapatkan kutipan akte kelahiran
 - 2) Tersedia fasilitas informal layak anak
 - 3) Jumlah kelompok anak, termasuk forum anak, yang ada di Kota, Kecamatan dan Kelurahan
 - * **Klaster II** : Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif
 - 1) Persentase usia perkawinan pertama dibawah 18 tahun
 - 2) Tersedianya lembaga konsultasi bagi orang tua/ keluarga tentang pengasuhan
 - 3) perawatan anak
 - 4) Tersedianya lembaga kesejahteraan sosial anak
 - * **Klaster III** : Kesehatan dasar dan kesejahteraan
 - 1) Angka kematian bayi (AKB)
 - 2) Prevelensi kekurangan gizi pada balita
 - 3) Persentase ASI eksklusif
 - 4) Jumlah pojok ASI
 - 5) Persentase imunisasi dasar lengkap

- 6) Jumlah lembaga yang memberikan pelayanan kesehatan reproduksi dan mental
- 7) Jumlah anak dari keluarga miskin yang memperoleh akses peningkatan kesejahteraan
- 8) Persentase rumah tangga dengan akses air bersih
- 9) Tersedianya kawasan tanpa rokok

* **Klaster IV** : Pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya

- 1) Angka partisipasi pendidikan anak usia dini
- 2) Persentase wajib belajar 12 tahun
- 3) Persentase sekolah ramah anak
- 4) Jumlah sekolah yang memiliki program, sarana dan prasarana perjalanan anak ke dan dari sekolah
- 5) Tersedianya fasilitas untuk kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah anak, di luar sekolah, yang dapat diakses semua anak.

* **Klaster V** : Perlindungan khusus

- 1) Persentase anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memperoleh pelayanan
- 2) Persentase kasus anak berhadapan hukum (ABH) yang diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif (restorative Justice)
- 3) Adanya mekanisme penanggulangan bencana yang memperhatikan kepentingan anak.
- 4) Persentase anak yang dibebaskan dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak.

Merujuk pada indikator di atas, pada tahun 2023 telah teralisasi 5 (lima) Kecamatan yang sudah memenuhi kriteria layak anak. Pencapaian kinerja sasaran ini telah memenuhi target, dimana target yang diperjanjikan sebanyak 100%, sedangkan realisasi Tahun 2023 sebanyak 100%, sehingga rasio pencapaian Kecamatan Layak Anak sebesar 100%.

Adapun faktor yang mendukung keberhasilan capaian kinerja tersebut antara lain: (1) Adanya regulasi berupa Peraturan Daerah terkait Kota Layak Anak (2) Adanya dukungan pemerintah daerah dalam rangka pemenuhan kebutuhan Kota Bima sebagai Kota Layak Anak (3) Kelembagaan Forum Anak di level Kota, kecamatan dan kelurahan cukup aktif, (4) Adanya Gugus Tugas KLA di level Kota, Kecamatan dan Kelurahan walaupun belum berjalan secara maksimal, serta (5) Adanya program yang relevan oleh pihak eksternal terkait anak.

Walaupun pada Tahun 2023 telah memenuhi dari target kinerja yang di perjanjikan, namun masih terdapat beberapa hambatan yang dihadapi antara lain sebagai berikut:

1. Masih kurangnya sosialisasi terhadap regulasi dalam hal ini Peraturan Daerah terkait Kota Layak Anak.
2. Masih kurangnya komitmen dari beberapa lintas sector sebagai mitra terkait pemenuhan kebutuhan dari Kota Layak Anak.
3. Kurangnya sosialisasi terkait Kota Layak Anak pada instansi pemerintah maupun swasta.
4. Kurangnya pendokumentasian atas kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka pemenuhan hak anak baik di instansi pemerintah maupun swasta.
5. Terbatasnya SDM yang memahami terkait Kota Layak Anak, baik di internal maupun di eksternal.
6. Anggaran program anak di level Kecamatan dan Kelurahan masih belum memadai, terutama untuk kegiatan forum anak di tingkat kecamatan dan kelurahan.

Pada Tahun 2023 Kota Bima telah berhasil memperoleh predikat sebagai Kota Layak Anak dengan kategori **tingkat nindya**. Peringkat ini mengalami peningkatan dibanding tahun 2022 dengan predikat **tingkat madya dan predikat tingkat pratama** pada tahun 2021. Namun demikian dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan predikat Kota Bima sebagai Kota Layak Anak tersebut guna peningkatan kinerja kedepan, maka langkah-langkah strategis yang akan diambil oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah (1) Meningkatkan sosialisasi terhadap regulasi dalam hal ini Peraturan Daerah terkait Kota Layak Anak tingkat Kota, Kecamatan dan kelurahan, serta lembaga pendidikan dan kesehatan, (2) Bimtek Indikator Kota Layak Anak (KLA) pada stakeholder terkait, mengingat setiap tahunnya indikator yang dinilai selalu mengalami perubahan, (3) Melaksanakan kegiatan Konferensi Hak Anak (KHA) guna membangun komitmen dengan berbagai stakeholder untuk mendorong sejumlah kebijakan yang lebih berpihak pada pemenuhan hak-hak-hak anak, (4) Melakukan pembinaan secara terus menerus kepada forum-forum dan kelembagaan anak yang ada di Kota Bima, serta (5) Pentingnya mendorong program Kota Layak Anak untuk dianggarkan di level Kecamatan dan Kelurahan dalam mewujudkan Kota Bima sebagai Kota Layak Anak (KLA).

Dalam mencapai target kinerja sasaran strategis tersebut telah dilaksanakan satu program yaitu (1) Program Pemenuhan Hak Anak (PHA), dengan didukung oleh 2 (dua) kegiatan antara lain: (1) Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota, (2) Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota, serta di dukung oleh 4 (empat) sub kegiatan antara lain: (1) Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota,

(2) Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota, (3) Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota, dan (4) Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota.

Adapun perbandingan capaian realisasi indikator eselon II, III dan Fungsional (koordinator) yang mendukung pencapaian sasaran strategis III Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima antara Tahun 2023 dengan tahun 2022, dapat dilihat pada table sebagai berikut:

Tabel 3.16: Perbandingan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Eselon II, III dan Fungsional (Koordinator) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima Tahun 2023 dengan Tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	PROGRAM /KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET 2023	Realisasi 2023	Capaian 2023	TARGET 2022	Realisasi 2022	Capaian 2022
3	Meningkatnya Pemenuhan hak anak	Persentase Kecamatan yang memenuhi kriteria layak anak	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	% lembaga yang memenuhi kriteria layak anak	54,76	54,76%	100%	47,62	47,62	100%
			Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga yang menyediakan fasilitas ramah anak	23 lembaga	23 Lembaga	100%	20 lembaga	20 lembaga	100%
			Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah gugus tugas yang terbentuk pada kecamatan dan kelurahan				14 lembaga	14 lembaga	100%
				Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	11 Organisasi	11 Organisasi	100%			
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Porsentase pembinaan gugus tugas KLA tingkat kelurahan di kecamatan				55%	55%	100%
				Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	7 Dokumen	7 Dokumen	100%			

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	PROGRAM /KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET 2023	Realisasi 2023	Capaian 2023	TARGET 2022	Realisasi 2022	Capaian 2022
			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah PKM & Sekolah yang menyediakan fasilitas ramah anak	8 PKM & 35 Sekolah	8 PKM & 35 sekolah	100%	3 PKM & 35 Sekolah	3 PKM & 35 Sekolah	100%
			Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Pembinaan sekolah dan puskesmas ramah anak				36 sekolah & 2 puskesmas	36 sekolah & 2 puskesmas	100%
				Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	60 Orang	60 orang	100%			
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Kelompok Forum Anak yang Aktif				80,85	80,85	100%
				Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	100%			

Pada Tahun 2023 Indikator Program merupakan indicator kinerja pada level eselon II. Dari tabel di atas diketahui bahwa indikator Program yang mendukung atas pencapaian kinerja sasaran strategis III Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki capaian sebesar 100%, sama dengan capaian rata-rata pada Tahun 2023 yaitu sebesar 100%. Sedangkan untuk Indikator Kegiatan pada tahun 2023 merupakan Indikator Kinerja eselon III. Adapun indikator Kegiatan yang mendukung atas pencapaian kinerja sasaran strategis III Tahun 2023 memiliki capaian rata-rata sebesar 100,00%, juga sama dengan capaian rata-rata pada Tahun 2022 yaitu sebesar 100%. Pada Tahun 2023 pejabat fungsional (Koordinator) yang bertanggungjawab untuk capaian indikator sub kegiatan. Adapun indikator sub kegiatan yang mendukung atas pencapaian kinerja sasaran strategis III Tahun 2023 memiliki capaian rata-rata sebesar 100%, capaian rata-rata ini sama seperti yang diperoleh pada Tahun 2022 yaitu sebesar 100%.

Untuk keberhasilan capaian indikator kinerja sasaran III, dibutuhkan dukungan 1 (satu) program dengan 2 (dua) kegiatan dan 4 (empat) sub kegiatan. Dari hasil analisis efisiensi penggunaan sumber daya tersebut dapat dikatakan bahwa pencapaian indikator kinerja sasaran Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak dilakukan dengan penggunaan sumber daya yang efisien, karena capaian kinerja menunjukkan persentase keberhasilan yang lebih tinggi dari pada persentase realisasi penggunaan dana. Adapun gambaran penggunaan anggaran untuk pencapaian indikator sasaran tersebut yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.17. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Anggaran Untuk Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran III Tahun 2023

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2023	REALISASI 2023	CAPAIAN 2023	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	% PENYERAPAN	EFISIENSI
Meningkatnya Pemenuhan hak anak	Persentase Kecamatan yang memenuhi kriteria layak anak	100%	100%	100,00%	260.161.200	242.594.300	93,25	Efisien

Dari tabel di atas diketahui bahwa terdapat efisiensi sumber daya yang digunakan dalam pencapaian indikator kinerja Persentase Kecamatan yang memenuhi kriteria layak anak pada sasaran strategis III yaitu sebesar Rp. 17.566.900 (6,75%).

3.2. Realisasi Anggaran

1. Target dan Realisasi Belanja

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Kota Bima pada tahun 2023 telah melaksanakan serangkaian program kegiatan yang telah menghasilkan berbagai macam tingkat capaian yang didasari dari berbagai macam indikator sasaran, baik itu sasaran strategik, sasaran program, sasaran kegiatan maupun sasaran sub kegiatan. Secara umum sebagaimana yang tertuang di dalam Dokumen Penggunaan Perubahan Anggaran (DPPA-SKPD) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Kota Bima pada Tahun 2023 mendapat alokasi sebesar Rp. 9.883.351.886,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 9.516.402.544,- dan capaian persentase sebesar 96,29%. Adapun rincian alokasi dan realisasi anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai berikut :

Lebih rinci, anggaran dan realisasi keuangan Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.18.
Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima
Tahun 2023

No.	Komponen	Tahun 2023 (Rp)		%
		Anggaran	Realisasi	
1	Belanja Daerah	9.883.351.886,00	9.516.402.544,00	96,29
1.1	Belanja Operasi	9.572.554.386,00	9.218.433.742,00	96,30
1.1.1	Belanja Pegawai	2.681.488.806,00	2.616.306.581,00	97,57
1.1.2	Belanja Barang Jasa	5.571.065.580,00	5.282.127.161,00	94,81
1.1.3	Belanja Hibah	1.320.000.000,00	1.320.000.000,00	100,00
1.2	Belanja Modal	310.797.500,00	297.968.802,00	95,87
1.2.1	Belanja Peralatan dan Mesin	310.797.500,00	297.968.802,00	95,87
Jumlah Belanja		9.883.351.886,00	9.516.402.544,00	96,29

Sehubungan dengan pengelolaan Anggaran tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa secara garis besar pelaksanaan dan pengelolaan keuangan telah sesuai dengan aturan dan prosedur administrasi keuangan yang berlaku, dengan sistim pelaporan dan pertanggungjawaban yang telah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, yaitu hemat, efisien dan efektif serta mengusahakan seminimal mungkin terjadinya penyimpangan atau penyalahgunaan.

2. Pengukuran Kinerja Keuangan

Selama Tahun Anggaran 2023, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Kota Bima melaksanakan 6 (Enam) Program, 18 (Delapan belas)

Kegiatan, 46 (empat puluh enam) Sub Kegiatan. Adapun hasil pengukuran kinerja keuangan terhadap pelaksanaan program/kegiatan utama sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2023.

Selain itu, dalam rangka mendukung pelaksanaan program/kegiatan utama, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Kota Bima pada tahun 2023 juga menyelenggarakan program dan kegiatan rutin sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 3.19
Realisasi Anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Rutin dan Wajib
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima
Tahun 2023

NO	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Pagu	Realisasi	%
1	3	4	5	6
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	3.537.239.706	3.466.050.883	97,99
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi A Kinerja Perangkat Daerah	19.963.000,00	19.963.000,00	100,00
	01 Penyusunan rencana kerja tahunan, Renja/Renstra	3.181.000,00	3.181.000	100,00
	02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.929.000,00	1.929.000	100,00
	03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.929.000,00	1.929.000	100,00
	04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.101.000,00	1.101.000	100,00
	05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1.101.000,00	1.101.000	100,00
	06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6.964.000,00	6.964.000	100,00
	07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.758.000,00	3.758.000	100,00
	B Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.685.019.306,00	2.620.498.581,00	97,60
	01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.551.608.806,00	2.497.106.581	97,86
	03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	129.692.500,00	119.674.000	92,28
	05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.879.000,00	1.879.000	100,00
	07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1.839.000,00	1.839.000	100,00
	C Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	23.000.000	22.954.000	99,80
	02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	23.000.000,00	22.954.000	99,80
	D Administrasi Umum Perangkat Daerah	342.096.100	339.379.072	99,21
	01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.386.800,00	4.372.300	99,67
	02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	34.181.500,00	34.160.000	99,94
	04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	16.240.000,00	16.182.000	99,64

NO	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		Pagu	Realisasi	%
1	3		4	5	6
	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	28.366.000,00	28.366.000	100,00
	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	258.921.800,00	256.298.772	98,99
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		139.797.500	138.808.002	99,29
	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	139.797.500,00	138.808.002	99,29
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		158.123.800	155.590.300	98,40
	01	Penyediaan jasa surat menyurat	122.100.000,00	120.895.000	99,01
	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	10.816.800,00	9.488.300	87,72
	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	25.207.000,00	25.207.000	100,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		169.240.000	168.857.928	99,77
	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	129.110.000,00	128.938.928	99,87
	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	24.420.000,00	24.209.000	99,14
	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	11.440.000,00	11.440.000	100,00
	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4.270.000,00	4.270.000	100,00
II	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN		4.742.196.580,00	4.583.624.111,00	96,66
	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota		83.537.800,00	78.476.500,00	93,94
	02	Koordinasi dan Singkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan PUG termasuk PPRG	58.095.600,00	53.374.300	91,87
	04	Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	25.442.200,00	25.102.200	98,66
	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota		1.303.135.600,00	1.294.015.917,00	99,30
	02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan Dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	1.303.135.600,00	1.294.015.917	99,30
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota		3.355.523.180,00	3.211.131.694,00	95,70
	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	127.358.700,00	116.830.700	91,73
	02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Perempuan Kewenangan Kota/Kabupaten	2.766.930.080,00	2.692.943.794	97,33

NO	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		Pagu	Realisasi	%
1	3		4	5	6
	03	Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kota/Kabupaten	461.234.400,00	401.357.200	87,02
III	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN		380.486.800,00	320.302.580,00	84,18
	A Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		175.514.900,00	175.114.900,00	99,77
	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan	43.792.800,00	43.792.800	100,00
	02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	131.722.100,00	131.322.100	99,70
	B Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota		204.971.900,00	145.187.680,00	70,83
	01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	69.479.900,00	63.812.680	91,84
	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	135.492.000,00	81.375.000	60,06
IV	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK		47.427.000,00	43.034.000,00	90,74
	A Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/kota		47.427.000,00	43.034.000,00	90,74
	01	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	38.046.000,00	37.841.000	99,46
	02	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	9.381.000,00	5.193.000	55,36
V	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)		260.161.200,00	242.594.300,00	93,25
	A Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota		186.338.500,00	170.311.600,00	91,40
	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	6.578.700,00	6.385.500	97,06
	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	179.759.800,00	163.926.100	91,19
	B Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		73.822.700,00	72.282.700,00	97,91
	01	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	4.320.000,00	4.320.000	100,00
	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	69.502.700,00	67.962.700	97,78
VI	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK		915.840.600,00	860.796.670,00	93,99

NO	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Pagu	Realisasi	%
1	3	4	5	6
	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	343.691.600,00	342.419.970,00	99,63
	01 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	237.984.400,00	237.105.270	99,63
	02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	105.707.200,00	105.314.700	99,63
	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	385.843.800,00	358.534.900,00	92,92
	01 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	174.495.800,00	171.134.900	98,07
	02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	211.348.000,00	187.400.000	88,67
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	186.305.200,00	159.841.800,00	85,80
	02 Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	112.548.000,00	98.061.100	87,13
	03 Koordinasi dan Sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus	73.757.200,00	61.780.700	83,76
	Jumlah	9.883.351.886,00	9.516.402.544,00	96,29

Sehubungan dengan pengelolaan Anggaran tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa secara garis besar pelaksanaan dan pengelolaan keuangan telah sesuai dengan aturan dan prosedur administrasi keuangan yang berlaku, dengan sistim pelaporan dan pertanggungjawaban yang telah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, yaitu hemat, efisien dan efektif serta mengusahakan seminimal mungkin terjadinya penyimpangan atau penyalahgunaan.

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) menggambarkan penekanan pada manajemen pembangunan berbasis kinerja dan perbaikan pelayanan publik, dimana setiap organisasi pemerintah melakukan pengukuran dan pelaporan atas kinerja institusi dengan menggunakan indikator yang jelas dan terukur. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pemberdayaan perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bima tahun 2023 memiliki nilai strategis karena penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi selama tahun 2023 merupakan tahun keempat RPJMD Kota Bima 2018-2023 dan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2018-2023.

Sebagai bagian penutup dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini dapat disimpulkan bahwa secara umum Dinas Pemberdayaan perempuan Dan Perlindungan Anak telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang sangat baik atas sasaran-sasaran strategisnya yang terukur melalui indikator kinerja yang telah ditetapkan. Pencapaian ini dilaksanakan melalui program dan kegiatan pokok maupun pendukung yang telah dilaksanakan dengan baik selama tahun 2023.

Sasaran strategis sebagaimana tertuang dalam penetapan kinerja tahun 2023 semuanya telah direalisasikan dengan kategori sangat tinggi sebanyak 3 (tiga) indikator sasaran strategis dan 1 (satu) indikator sasaran strategis dengan kategori sedang. Adapun rata-rata capaian indikator kinerja dengan kategori sangat tinggi sebesar 100,00% bahkan lebih, sedangkan kategori cukup capaian indikator kerjanya sebesar (65,89%). Untuk realisasi penyerapan anggaran (Keuangan) sebesar 96,29%.

Rata-rata capaian sasaran strategis adalah sebesar lebih dari 100,00% yang terukur melalui 4 (empat) indikator kinerja utama. Capaian sasaran strategis I yang terukur melalui 1 (satu) indikator kinerja yaitu Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) sebesar 103,02% dan capaian sasaran strategis II yang terukur melalui 2 (dua) indikator kinerja yaitu Angka KDRT sebesar 190,84% dan indikator Angka Kekerasan terhadap anak sebesar (65,89%), Serta capaian sasaran strategis III yang terukur melalui 1 (satu) indikator kinerja yaitu Persentase Kecamatan yang memenuhi kriteria layak anak sebesar 100%.

Rata-rata capaian sasaran strategis I, II, dan III terhadap target jangka menengah Dinas Pemberdayaan perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bima yaitu sebesar 115,11%, namun terdapat capaian kinerja indikator yang belum memenuhi target bila dibandingkan dengan target Renstra 2018-2023, yaitu pada capaian kinerja sasaran strategis II indikator Angka Kekerasan terhadap anak baru mencapai

(66,58%). Sehingga perlu ditingkatkan capain kinerja, agar dapat mencapai target yang sudah di tetapkan pada akhir periode renstra.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap indikator kinerja sasaran yang tercantum dalam dokumen penetapan kinerja Dinas Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima Tahun 2023 dapat terpenuhi dengan baik, namun perencanaan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kotra Bima perlu dioptimalkan lagi agar lebih efektif dan efisien guna mendukung pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kota Bima.

4.2. Rekomendasi Pemecahan Masalah

Sebagai bagian dari perbaikan kinerja Dinas Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima yang menjadi tujuan dari penyusunan LKIP, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting bagi Dinas Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak sebagai bahan dan masukan yang baik untuk memperbaiki kinerja organisasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan di tahun-tahun berikutnya. Berbagai permasalahan yang masih dihadapi serta upaya pemecahan masalah yang sudah dirumuskan tidak akan terlaksana jika tidak ditindaklanjuti dengan baik di masa yang akan datang. Tindak lanjut yang dimaksud adalah upaya konkret untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak melalui program dan kegiatan secara konsisten dan optimal. Dengan demikian, LKIP dapat menjadi instrumen yang efektif bagi sistem monitoring dan evaluasi dalam rangka peningkatan kinerja pemerintahan dan perbaikan layanan publik.

Memperhatikan sejumlah kekurangan dalam proses perencanaan pembangunan yang masih dihadapi hingga saat ini dan dalam rangka memperkuat peran kelembagaan Dinas Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima agar dapat menjadi organisasi pelaksana teknis pembangunan daerah dalam melaksanakan Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak yang lebih baik di masa yang akan datang, maka perlu beberapa langkah tindaklanjut yang dapat diupayakan untuk tahun berikutnya seperti sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemahaman setiap Perangkat Daerah (PD) bahwa isu gender sudah menjadi isu bersama dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.
2. Meningkatkan penyelenggaraan pendidikan politik perempuan secara berkelanjutan dalam rangka pengkaderan caleg perempuan dengan kualitas yang mampu bersaing dengan kaum laki-laki.

3. Menyelenggarakan sekolah perempuan di setiap kecamatan maupun kelurahan sebagai wadah untuk peningkatan pengetahuan dan keterampilan pagi perempuan.
4. Mendorong dimudahkannya pemberian bantuan modal/kredit usaha pada kelompok-kelompok usaha perempuan hasil kerjasama dengan berbagai lintas sector, terutama dengan pihak perbankan, guna menumbuhkan minat usaha dalam rangka meningkatkan nilai pendapatan bagi perempuan.
5. Meningkatkan sosialisasi terkait penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
6. Pembentukan Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD).
7. Pemantapan dan penguatan kelembagaan yang menangani bidang perlindungan perempuan dan anak, koordinasi berkelanjutan dan membangun komitmen dengan pihak-pihak terkait.
8. Meningkatkan sosialisasi terhadap regulasi dalam hal ini Peraturan Daerah terkait Kota Layak Anak tingkat Kota, Kecamatan dan kelurahan.
9. Membangun komitmen dengan berbagai stakeholder untuk mendorong sejumlah kebijakan yang lebih berpihak pada pemenuhan hak-hak anak.
10. Pentingnya mendorong program Kota Layak Anak untuk dianggarkan di level Kecamatan dan Kelurahan dalam mewujudkan Kota Bima sebagai Kota Layak Anak (KLA)
11. Penempatan aparatur berdasarkan analisa beban kerja yang sudah dilakukan dengan memperhatikan kemampuan masing-masing sumber daya aparatur yang ada (*right man on the right place*).

Akhirnya, besar harapan kami Laporan Kinerja (LKIP) Dinas Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima ini dapat digunakan sebagai alat pertanggungjawaban publik yang transparan dan akuntabel serta sebagai media evaluasi dalam melakukan pengelolaan kinerja yang lebih baik di masa yang akan datang, sehingga hasilnya diharapkan mampu memberikan kontribusi positif bagi Pemerintah Kota Bima dalam rangka merencanakan Pembangunan Daerah dan menciptakan *Good Governance* di lingkungan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima yang tentunya tak mungkin berhasil tanpa bantuan dari segala pihak.

Kota-Bima, Februari 2024

Kepala DPP – PA



Syahrudin, SH, M.M

Penilik Tk. I/ IV.b

NIP. 19690707 198903 1 004